PROFIL
GENDER & ANAK
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025



DISUSUN OLEH:
Bidang Pengelolaan Data Gender
dan Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

PROFIL
GENDER & ANAK
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025



DISUSUN OLEH:
Bidang Pengelolaan Data Gender
dan Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang



Ukuran Buku : 15 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 110 halaman

Tim Penyusun
Pengarah:
H. Asep Suherman, S.H., M.B.A., M.M.

Penanggung Jawab:
H. M. Farid Ma'rup, S.Sos., M.Si.

Penyunting:
Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Pengolah Data dan Desain grafis:
Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Diterbitkan oleh:
©Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang 2025
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak!

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG

PERIODE 2025 – 2030



Drs. **MOCH. MAESYAL RASYID**, M.Si.
Bupati



INTAN NURUL HIKMAH, S.E.
Wakil Bupati

Kata Sambutan



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Gender dan Anak-Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik semata, melainkan dari seberapa jauh pembangunan tersebut mampu menyejahterakan manusianya secara adil dan merata. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menempatkan pembangunan manusia, khususnya perempuan dan anak, sebagai prioritas utama.

Buku profil ini memiliki nilai strategis yang sangat penting. Di era *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti), ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia anak adalah fondasi mutlak. Tanpa data yang akurat, intervensi pemerintah dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting, angka putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengentasan kemiskinan ekstrem, tidak akan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Saya mengapresiasi terbitnya buku ini yang menyajikan potret komprehensif mengenai capaian kinerja, sekaligus tantangan yang masih kita hadapi dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender. Data yang

tersaji harus menjadi "cermin" bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah dan Kepala Desa, untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan merencanakan kebijakan yang lebih inklusif ke depannya.

Kepada seluruh jajaran perangkat daerah, saya berharap agar menjadikan data dalam buku ini sebagai rujukan utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) serta dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Mari kita perkuat sinergi lintas sektor, hilangkan ego sektoral, dan pastikan tidak ada satupun warga Kabupaten Tangerang yang tertinggal dalam pembangunan *(no one left behind)*.

Terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga ikhtiar kita bersama senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tigaraksa, Desember 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Rasa syukur yang mendalam kami haturkan ke hadirat Allah SWT. Atas izin-Nya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang dapat mempersembahkan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Buku ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan amanat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perlindungan anak. Lebih dari sekadar kumpulan angka statistik, buku ini merekam dinamika kehidupan sosial perempuan dan anak di 29 kecamatan, mulai dari akses terhadap kesehatan, partisipasi pendidikan, peran ekonomi, hingga perlindungan dari kekerasan.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi kita. Di satu sisi, kita melihat capaian positif seperti peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka kematian ibu. Namun, di sisi lain, buku ini juga secara jujur memaparkan tantangan yang masih harus kita selesaikan, termasuk isu perkawinan anak, pengasuhan alternatif bagi anak terlantar, serta perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui pendekatan analisis berbasis lima klaster Konvensi Hak Anak (KHA), profil ini diharapkan dapat membuka wawasan para pemangku kepentingan bahwa isu gender dan anak adalah isu lintas sektor.

Kesehatan ibu, pendidikan anak perempuan, dan perlindungan anak dari kekerasan adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta seluruh OPD terkait yang telah bahu-membahu menyediakan data sektoral yang valid dan mutakhir. Kerja sama ini membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama kita. Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih setara, berkeadilan, dan ramah anak, demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tigaraksa, Desember 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Sekapur Sirih



Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan sebuah proses panjang yang melibatkan dedikasi, ketelitian, dan kerja sama tim yang solid. Sebagai unit kerja yang mengawal pengelolaan data, Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak merasa bangga dapat menyajikan buku ini kepada publik.

Tantangan terbesar dalam pembangunan manusia seringkali berawal dari ketiadaan data yang presisi. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan data terpilah *(disaggregated data)* berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Kami berupaya menyajikan data yang tidak hanya akurat secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara kualitatif, guna menggambarkan realitas objektif kondisi perempuan dan anak di lapangan.

Buku ini disusun dengan sistematika yang runtut, mencakup tujuh bab utama yang mengulas Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Budaya, serta Perlindungan Khusus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui konsolidasi data administratif dari berbagai OPD, verifikasi lapangan, hingga *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memastikan validitas informasi yang disajikan.

Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang membangun guna penyempurnaan penyajian data di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tigaraksa, Desember 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender
dan Pemenuhan Hak Anak



Daftar Isi

Cover i
Bupati dan Wakil Bupati Tangerang iii
Kata Sambutan iv
Kata Pengantar vi
Sekapur Sirih viii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xii

BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Tujuan 6
1.3. Sumber Data 8
1.4. Sistematika penyajian 12
1.5. Sekilas Kabupaten Tangerang 15
1.6. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi 16
1.7. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan 17
1.8. Kondisi Sosial Budaya dan Perlindungan Anak 17
1.9. Arah Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak 18

BAB II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 21
2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 21
2.2. Jumlah Anak Kabupaten Tangerang 24
2.3. Kepemilikan Akta Kelahiran 27
2.4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 29
2.5. Hak Akses Informasi dan Literasi Digital 32
2.6. Tantangan dan Arah Kebijakan 37

BAB III LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 42
3.1. Jumlah Kepala Keluarga 42
3.2. Pengasuhan Alternatif dan Anak Terlantar 45
3.3. Panti Sosial Anak dan Lembaga Pengasuhan 49



3.4. Perkawinan Anak 52
3.5. Tantangan dan Arah Kebijakan 56

BAB IV KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK 61
4.1. Derajat Kesehatan Anak dan Balita 61
4.2. Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Anak 63
4.3. Kesehatan Ibu dan Reproduksi Remaja 66
4.4. Anak dengan Disabilitas dan Akses Pelayanan Kesehatan. 67
4.5. Anak dari Keluarga Miskin dan Akses Jaminan Sosial Kesehatan 69
4.6. Sanitasi dari Lingkungan Sehat 72
4.7. Tantangan dan Arah Kebijakan 75

BAB V PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 79
5.1. Akses dan Partisipasi Pendidikan 79
5.2. Anak Putus Sekolah dan Upaya Penanganannya 85
5.3. Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus 87
5.4. Pemanfaatan Waktu Luang, Kreativitas, dan Budaya 88
5.5. Anak dalam Kegiatan Budaya dan Pelestarian Tradisi 90
5.6. Tantangan dan Arah Kebijakan 91

BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 96
6.1. Anak Korban Kekerasan 96
6.2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 98
6.3. Anak Korban Eksploitasi 99
6.4. Anak Korban Perdagangan Orang (TPPO) 101
6.5. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Lainnya 102
6.6. Tantangan dan Arah Kebijakan 105

BAB VII PENUTUP 109
7.1. Kesimpulan 109



Daftar Tabel

Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 22
Tabel 2.1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 23
Tabel 2.1.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 25
Tabel 2.2.1. Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 28
Tabel 2.3.1 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Menurut Kecamatan Tahun 2024 30
Tabel 2.4.1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Menurut Kecamatan Tahun 2024 33
Tabel 2.5.1. Jumlah Jaringan Internet Publik Gratis (*Wifi* Tangerang Gemilang) Tahun 2024 44
Tabel 3.1.1. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 44
Tabel 3.1.2. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 46
Tabel 3.2.1. Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 47
Tabel 3.2.2. Jumlah Anak Balita Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 51
Tabel 3.3.1. Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2022
Tabel 3.4.1. Jumlah Dispensasi Nikah Menurut Kecamatan Tahun 2024 54
Tabel 4.1.1. Data Kesehatan Anak Tahun 2024 62
Tabel 4.2.1. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas Tahun 2024 64
Tabel 4.3.1. Jumlah Remaja (Usia 10-18 Tahun) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 66
Tabel 4.4.1. Jumlah Anak Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 68
Tabel 4.5.1. Jumlah Kepala Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 70



Tabel 4.5.2. Jumlah Penerima Bantuan Iuran Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024 71
Tabel 4.6.1. Jumlah Keluarga dengan Akses Sanitasi yang Layak Menurut Puskesmas Tahun 2024 73
Tabel 5.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2021-2024 80
Tabel 5.1.2. Jumlah Murid Sekolah Tingkat Dasar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 80
Tabel 5.1.3. Jumlah Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ... 81
Tabel 5.1.4. Jumlah Sekolah Tingkat Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2024 82
Tabel 5.1.5. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan Tahun 2024 83
Tabel 5.1.6. Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2024 84
Tabel 5.2.1. Jumlah Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2024 86
Tabel 6.1.1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2023 97
Tabel 6.2.1. Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023 99
Tabel 6.3.1. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Tahun 2019-2024 101
Tabel 6.4.1. Jumlah Anak Korban Perdagangan Orang Tahun 2019-2023 102
Tabel 6.5.1. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 ... 104



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Sumber Data
1.4. Sistematika penyajian
1.5. Sekilas Kabupaten Tangerang
1.6. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi
1.7. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan
1.8. Kondisi Sosial Budaya dan Perlindungan Anak
1.9. Arah Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

KABUPATEN TANGERANG

BATAS WILAYAH

Utara: Laut Jawa dan Kabupaten Serang
Selatan: Kabupaten Bogor
Timur: Kota Tangerang dan DKI Jakarta
Barat: Kabupaten Serang



EKONOMI

Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional, dengan lebih dari 4.000 perusahaan yang tersebar di berbagai kawasan industri seperti Cikupa, Jatiuwung, Curug, dan Balaraja.

SOSIAL BUDAYA

Kabupaten Tangerang memiliki masyarakat yang majemuk dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kekeluargaan, dan toleransi menjadi modal sosial penting dalam memperkuat kohesi sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia yang berkeadilan dan inklusif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi dua pilar penting yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana seluruh penduduk laki-laki, perempuan, dan anak dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan secara setara.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak berakar pada komitmen nasional dan internasional yang telah dituangkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Secara global, komitmen Indonesia tercermin dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta menjamin partisipasi mereka dalam setiap aspek kehidupan.

Di tingkat nasional, dasar hukum yang menguatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak antara lain:



1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Data Gender dan Anak, yang mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan yang responsif gender dan berpihak pada anak.
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang memperkuat sinergi pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan inklusif dan berbasis data.

Selain itu, pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2023–2028



telah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan, dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak. Hal ini menunjukkan keselarasan arah kebijakan Kabupaten Tangerang dengan kebijakan nasional dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia anak yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut memiliki peran penting dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah. Dengan adanya profil ini, diharapkan para pengambil kebijakan memiliki landasan informasi yang kuat dalam menyusun kebijakan yang sensitif terhadap gender dan ramah anak.

Lebih jauh, profil ini juga menjadi wujud pelaksanaan prinsip good governance, yakni pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti *(evidence-based policy).* Pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga vertikal, dan mitra pembangunan, melalui kegiatan Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2025 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui integrasi data lintas sektor.



Keduanya merupakan pilar pembangunan sosial yang menekankan pentingnya kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang yang sangat dinamis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara dan pusat industri, perdagangan, serta jasa membawa tantangan tersendiri. Urbanisasi yang tinggi, peningkatan angka partisipasi kerja perempuan, serta kerentanan anak terhadap isu sosial seperti kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, data dan analisis yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat membantu dalam perumusan strategi intervensi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan langkah nyata dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak. Melalui buku ini, Pemerintah Daerah berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan memperluas pemahaman seluruh pihak tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai pondasi utama menuju masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan berkeadilan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memiliki tujuan utama untuk menghadirkan data dan analisis yang komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak. Buku ini tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga instrumen advokasi dan penguatan kapasitas bagi para pengambil



kebijakan di daerah dalam mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak ke dalam seluruh sektor pembangunan.

Secara lebih rinci, tujuan penyusunan buku ini meliputi:

1. Menyediakan Data Terpilah dan Akurat

   Menyajikan data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur anak, serta wilayah administrasi, sehingga dapat menggambarkan kondisi faktual perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.

2. Menjadi Dasar Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak

   Menyediakan dasar informasi bagi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperhatikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat bagi laki-laki, perempuan, dan anak.

3. Meningkatkan Efektivitas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA)

   Menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan strategi PUG dan KLA di Kabupaten Tangerang melalui penyediaan data yang valid, mutakhir, dan relevan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

4. Mengidentifikasi Kesenjangan dan Permasalahan Pembangunan

   Mendeteksi ketimpangan, hambatan, serta permasalahan yang masih dihadapi oleh perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan perlindungan untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan.



5. Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
   Menguatkan kontribusi Kabupaten Tangerang terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender), Tujuan ke-10 (Mengurangi Kesenjangan), dan Tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
6. Menjadi Media Advokasi dan Edukasi Publik
   Menjadi sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas mengenai kondisi, tantangan, dan kemajuan perempuan serta anak di Kabupaten Tangerang, sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil gender.
7. Membangun Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor
   Mendorong kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data gender dan anak.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 diharapkan menjadi sumber rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

1.3. Sumber Data

Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 didasarkan pada data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber resmi pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan forum kolaboratif lintas sektor. Data tersebut



dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia anak, wilayah kecamatan, dan status sosial ekonomi untuk menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang.

Pengumpulan data dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai koordinator utama bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak, dengan dukungan teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga pendukung lainnya. Setiap OPD berperan menyajikan data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tercipta integrasi data lintas bidang pembangunan.

Secara umum, sumber data dalam penyusunan buku ini meliputi:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

   Sebagai koordinator utama penyusunan profil, DP3A bertanggung jawab atas konsolidasi, analisis, dan penyusunan narasi pembangunan gender dan anak, serta memastikan kesesuaian data dengan indikator nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

   Menyediakan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator kinerja utama, serta mendukung integrasi data profil ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra OPD.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

   Menyediakan data dasar kependudukan terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status pernikahan sebagai landasan utama analisis demografis perempuan dan anak.



4. Dinas Kesehatan (Dinkes)

   Menyajikan data mengenai derajat kesehatan perempuan dan anak, termasuk angka kematian ibu dan bayi, status gizi, imunisasi, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan anak.

5. Dinas Pendidikan (Disdik)

   Memberikan data terkait partisipasi pendidikan, angka melek huruf, angka putus sekolah, serta kesenjangan gender di bidang pendidikan formal dan nonformal.

6. Dinas Sosial (Dinsos)

   Menyediakan informasi mengenai kondisi kesejahteraan sosial perempuan dan anak, termasuk data anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan penerima bantuan sosial.

7. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)

   Menyampaikan data ketenagakerjaan terpilah berdasarkan jenis kelamin, termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, pekerja rentan, serta kasus ketenagakerjaan yang melibatkan perempuan dan anak. Data dari Disnaker juga digunakan untuk menganalisis kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan serta tantangan dalam mewujudkan kesempatan kerja yang setara dan layak.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

   Berperan dalam mendukung sistem informasi, publikasi data, serta digitalisasi hasil profil gender dan anak agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.



9. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang

   Menyediakan data makro dan statistik sektoral yang menjadi acuan validasi data dari OPD, termasuk data sensus dan survei yang digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif dalam buku ini.

10. Forum Anak Kabupaten Tangerang

    Menjadi mitra strategis dalam penyampaian perspektif anak, memberikan masukan terhadap kondisi aktual di lapangan, serta berperan dalam advokasi dan sosialisasi hak anak di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

11. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Mitra Pembangunan

    Turut memberikan kontribusi melalui program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Proses validasi data dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh perwakilan OPD, lembaga vertikal, serta mitra strategis. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan dan klarifikasi terhadap data sektoral untuk memastikan kesesuaian, akurasi, dan konsistensi antarbidang. Hasil FGD menjadi dasar dalam penyusunan tabel, grafik, dan narasi analisis yang disajikan di setiap bab buku ini.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memuat data kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan sistem informasi gender dan anak yang terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada

perempuan serta anak sebagai bagian integral dari masyarakat Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang dan Setara.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan, mulai dari pengambil kebijakan, akademisi, hingga masyarakat umum. Struktur buku ini mengikuti pendekatan analisis berbasis lima klaster hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*-CRC) dan Kebijakan Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap aspek pembangunan.

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

BAGIAN AWAL (PEMBUKA BUKU)

Berisi Sambutan Bupati Tangerang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak, disertai Kata Pengantar serta Daftar Isi. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai tujuan dan makna penyusunan buku, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, tujuan, sumber data, serta sistematika penyajian buku. Bab ini menegaskan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan



BAB II HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Menyajikan data dan analisis mengenai identitas hukum, partisipasi anak dalam kehidupan publik, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap informasi. Dalam konteks gender, bab ini juga mengulas tentang kepemilikan dokumen identitas penduduk terpilah laki-laki dan perempuan serta keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB III LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Membahas kondisi keluarga, pola pengasuhan anak, serta dukungan sosial bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga. Bab ini menyoroti peran ibu dan ayah dalam pembentukan karakter anak serta dukungan pemerintah terhadap keluarga melalui program kesejahteraan sosial, termasuk intervensi bagi anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak dalam asuhan alternatif.

BAB IV KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Menguraikan kondisi kesehatan ibu, bayi, dan anak; angka kematian ibu dan anak; status gizi; imunisasi; serta akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Analisis gender di bab ini berfokus pada perbedaan tingkat kesehatan dan akses pelayanan antara perempuan dan laki-laki, serta tantangan dalam mewujudkan keluarga sehat di Kabupaten Tangerang.

BAB V PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Menampilkan data partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, serta kesenjangan gender di dunia pendidikan. Selain itu, bab ini juga memuat informasi mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan olahraga, seni, budaya, dan kreativitas yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS

Menguraikan kondisi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta anak yang terdampak bencana. Bab ini juga menampilkan kebijakan, program, dan layanan perlindungan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BAB VII KESIMPULAN

Berisi rangkuman kondisi umum perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang serta rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan masukan bagi OPD dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan persentase untuk menggambarkan kondisi faktual, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan makna di balik angka-angka dan



mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan gender atau permasalahan anak.

Melalui penyusunan buku ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap dapat mewujudkan sistem data dan informasi gender serta anak yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Data ini diharapkan menjadi landasan dalam upaya bersama membangun masyarakat Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

1.5. Sekilas Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Banten yang memiliki peran vital sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Negara dan bagian integral dari kawasan metropolitan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). Dengan luas wilayah sekitar 959,61 km^2, Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, serta memiliki jumlah penduduk lebih dari 3,2 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024.

Secara geografis, Kabupaten Tangerang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kabupaten Serang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Timur : Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang

Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai gerbang utama Provinsi Banten dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia bagian barat. Wilayah ini dilalui oleh berbagai infrastruktur penting nasional, seperti Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tol Jakarta–Merak,



Tol Jakarta–Serpong, dan Jalur Kereta Api, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa.

1.5.1. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi

Struktur penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari 68% dari total populasi. Kondisi ini memberikan potensi besar bagi pembangunan ekonomi daerah, namun juga menuntut perhatian terhadap penyediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan berkualitas, serta jaminan perlindungan sosial yang merata. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan rasio jenis kelamin sekitar 101 laki-laki per 100 perempuan.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional, dengan lebih dari 4.000 perusahaan yang tersebar di berbagai kawasan industri seperti Cikupa, Jatiuwung, Curug, dan Balaraja. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan pertanian.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menunjukkan tren positif, tantangan ketimpangan sosial masih menjadi perhatian. Urbanisasi yang tinggi, peningkatan harga tanah dan hunian, serta kompetisi tenaga kerja menimbulkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam konteks gender, perempuan menghadapi tantangan ganda dalam akses terhadap pekerjaan layak dan perlindungan sosial.



1.5.2. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Akses terhadap pendidikan dasar dan menengah telah meluas, dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Namun, tantangan masih terdapat dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah perdesaan, anak penyandang disabilitas, dan anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas, posyandu, serta program intervensi gizi. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren penurunan, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, terutama di wilayah padat penduduk. Permasalahan kesehatan seperti stunting, anemia, dan kesehatan reproduksi remaja juga menjadi fokus perhatian.

1.5.3. Kondisi Sosial Budaya dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang memiliki masyarakat yang majemuk dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kekeluargaan, dan toleransi menjadi modal sosial penting dalam memperkuat kohesi sosial dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Namun demikian, modernisasi dan perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender, eksploitasi anak, dan penyalahgunaan media digital. Pemerintah



Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melakukan berbagai program, termasuk penguatan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, serta Desa/Kelurahan Layak Anak.

1.5.4. Arah Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

Sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam seluruh sektor pembangunan. Implementasi PUG dilakukan melalui penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) di setiap OPD.

Kelima klaster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus dijadikan sebagai kerangka kerja untuk memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Dengan semangat **"Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang"**, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



BAB II
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

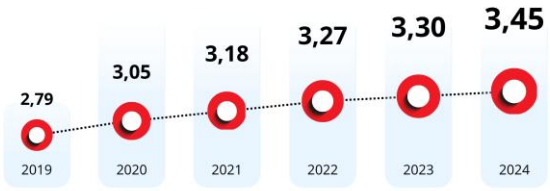
2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang
2.2. Jumlah Anak Kabupaten Tangerang
2.3. Kepemilikan Akta Kelahiran
2.4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
2.5. Hak Akses Informasi dan Literasi Digital
2.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

Penduduk Kabupaten Tangerang capai 3,4 juta jiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang mencatat penduduk Kabupaten Tangerang hingga semester II tahun 2024 mencapai lebih dari 3,4 juta jiwa dengan didominasi kelompok usia produktif hampir 70 persen.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 2019-2024

(angka dalam juta jiwa)





Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak tahun 2024

PASAR KEMIS
263 ribu jiwa

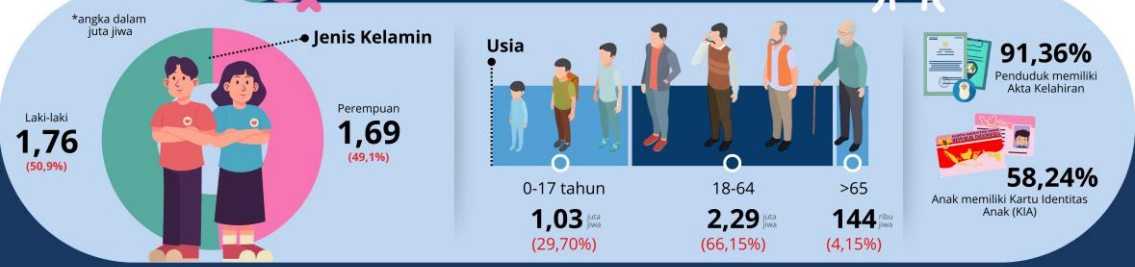
CIKUPA
214 ribu jiwa

RAJEG
202 ribu jiwa

Sebaran Penduduk



Demografi Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2024



Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang*

BAB II
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang

Data kependudukan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap gender dan anak. Jumlah penduduk memberikan gambaran tentang potensi sumber daya manusia sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kabupaten Tangerang sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara memiliki karakteristik penduduk yang dinamis. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain laju urbanisasi, perkembangan kawasan industri, serta migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah dengan tingkat mobilitas penduduk tertinggi di Provinsi Banten.

Pendataan penduduk yang terpilah menurut jenis kelamin menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh mana kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap layanan publik. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tangerang relatif seimbang, yang menandakan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan cukup proporsional di seluruh wilayah.

Selain itu, distribusi penduduk di setiap kecamatan tidak merata. Wilayah dengan kawasan industri dan pemukiman padat seperti Kecamatan Cikupa, Curug, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan



wilayah perdesaan seperti Kecamatan Mekar Baru, Kresek, dan Sukadiri. Sementara itu, daerah penyangga seperti Legok, Panongan, dan Cisauk juga menunjukkan peningkatan jumlah penduduk seiring dengan tumbuhnya kawasan hunian baru dan pengembangan wilayah urban.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai sebaran penduduk di Kabupaten Tangerang, berikut disajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, terpilah menurut jenis kelamin:

Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1.424.661	1.370.308	2.794.969
2020	1.556.524	1.501.075	3.057.599
2021	1.621.058	1.564.494	3.185.552
2022	1.666.239	1.607.082	3.273.321
2023	1.683.841	1.625.524	3.309.365
2024	1.761.008	1.698.698	3.459.706

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 2.1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	65.594	63.230	128.824
Cikupa	109.364	104.877	214.241
Cisauk	49.232	47.972	97.204
Cisoka	52.903	50.311	103.214
Curug	92.890	91.014	183.904
Gunung Kaler	29.570	28.895	58.465
Jambe	29.976	28.724	58.700
Jayanti	37.244	35.795	73.039
Kelapa Dua	86.751	87.376	174.127
Kemiri	27.160	26.099	53.259
Kosambi	59.264	57.131	116.395
Kresek	37.764	36.533	74.297
Kronjo	34.240	33.853	68.093
Legok	66.624	63.685	130.309
Mauk	48.399	46.137	94.536

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mekar Baru	23.397	22.769	46.166
Pagedangan	60.438	58.894	119.332
Pakuhaji	68.343	64.391	132.734
Panongan	69.554	67.090	136.644
Pasar Kemis	133.377	129.912	263.289
Rajeg	103.700	98.671	202.371
Sepatan	60.357	57.377	117.734
Sepatan Timur	57.292	53.742	111.034
Sindang Jaya	51.082	49.294	100.376
Solear	56.202	53.115	109.317
Sukadiri	35.394	33.840	69.234
Sukamulya	38.821	37.974	76.795
Teluknaga	89.408	85.747	175.155
Tigaraksa	86.668	84.250	170.918
Total	**1.761.008**	**1.698.698**	**3.459.706**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 2.1.3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM^2)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	128.824	32,30	5.964,59
Cikupa	214.241	46,00	1.784,16
Cisauk	97.204	30,05	2.077,76
Cisoka	103.214	31,21	2.935,71
Curug	183.904	30,83	6.641,24
Gunung Kaler	58.465	32,77	1.592,22
Jambe	58.700	28,25	3.225,00
Jayanti	73.039	24,88	2.477,42
Kelapa Dua	174.127	26,22	1.463,92
Kemiri	53.259	33,45	3.495,64
Kosambi	116.395	36,09	2.103,38
Kresek	74.297	29,99	1.790,45
Kronjo	68.093	46,51	2.351,29
Legok	130.309	37,28	2.433,36
Mauk	94.536	44,94	3.780,28
Mekar Baru	46.166	25,78	8.566,82
Pagedangan	119.332	50,75	3.796,77
Pakuhaji	132.734	54,55	6.124,56
Panongan	136.644	36,15	5.647,11
Pasar Kemis	263.289	30,73	2.424,87
Rajeg	202.371	53,30	3.208,31

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM²)	Kepadatan Penduduk
Sepatan	117.734	19,22	2.769,92
Sepatan Timur	111.034	19,66	3.018,73
Sindang Jaya	100.376	41,39	3.341,73
Solear	109.317	34,07	3.090,48
Sukadiri	69.234	24,99	3.344,19
Sukamulya	76.795	25,44	5.964,59
Teluknaga	175.155	52,41	1.784,16
Tigaraksa	170.918	55,30	2.077,76
Total	**3.459.706**	**1.034,54**	**2.935,71**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.2. Jumlah Anak Kabupaten Tangerang

Anak merupakan generasi penerus pembangunan daerah yang harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Data jumlah anak usia 0-17 tahun memberikan gambaran proporsi penduduk anak terhadap total populasi, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk anak yang cukup besar dibandingkan dengan total populasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Tangerang sedang berada pada fase bonus demografi, di mana proporsi usia produktif dan anak-anak mendominasi struktur penduduk. Jika potensi ini dikelola dengan baik, maka dapat menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan daerah.

Sebaran anak di Kabupaten Tangerang juga bervariasi antar wilayah. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Cikupa, Curug, Pasar Kemis, dan Kelapa Dua memiliki jumlah anak yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan di wilayah

perdesaan. Hal ini mencerminkan adanya konsentrasi keluarga muda di wilayah perkotaan dan kawasan industri.

Data jumlah anak di setiap kecamatan diperlukan untuk mengukur sejauh mana layanan dasar bagi anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, telah menjangkau seluruh kelompok usia anak di berbagai wilayah. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara berkala memperbarui data ini agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Berikut disajikan tabel jumlah anak usia 0–17 tahun di Kabupaten Tangerang berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2.2.1. Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	19.924	18.327	38.251
Cikupa	32.693	30.409	63.102
Cisauk	15.069	14.186	29.255
Cisoka	16.622	15.498	32.120
Curug	27.112	25.310	52.422
Gunung Kaler	8.963	8.344	17.307
Jambe	9.926	9.063	18.989
Jayanti	11.480	10.643	22.123
Kelapa Dua	23.042	21.217	44.259
Kemiri	8.671	8.064	16.735
Kosambi	17.004	15.703	32.707
Kresek	11.293	10.502	21.795
Kronjo	10.653	9.888	20.541
Legok	21.164	19.507	40.671
Mauk	14.770	13.732	28.502
Mekar Baru	7.349	6.733	14.082
Pagedangan	17.869	16.489	34.358
Pakuhaji	20.648	18.926	39.574
Panongan	21.853	20.072	41.925
Pasar Kemis	37.269	34.882	72.151
Rajeg	32.816	30.043	62.859



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sepatan	18.848	17.321	36.169
Sepatan Timur	17.477	16.130	33.607
Sindang Jaya	15.951	15.202	31.153
Solear	17.601	16.059	33.660
Sukadiri	10.848	10.051	20.899
Sukamulya	11.591	11.078	22.669
Teluknaga	27.041	25.183	52.224
Tigaraksa	27.360	26.099	53.459
Total	**532.907**	**494.661**	**1.027.568**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa proporsi anak di Kabupaten Tangerang cukup signifikan terhadap total penduduk. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Pertumbuhan jumlah anak juga berkaitan erat dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, data ini berperan penting dalam mendukung strategi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menekankan keterlibatan lintas sektor dalam memenuhi lima klaster hak anak:

1. Hak Sipil dan Kebebasan,
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta
5. Perlindungan Khusus.

Dengan tersedianya data anak yang terpilah dan akurat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terus memperkuat kebijakan dan program yang berpihak pada anak, sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



2.3. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menandai pengakuan hukum terhadap keberadaan seorang anak oleh negara. Dokumen ini menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak lainnya, seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pelayanan sosial. Tanpa akta kelahiran, seorang anak berisiko tidak diakui secara administratif dan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran strategis dalam menjamin setiap anak terdaftar secara sah melalui penerbitan akta kelahiran. Upaya ini merupakan bagian dari implementasi hak sipil anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Hingga tahun 2024, tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah, seperti program “Pelayanan Jemput Bola” ke desa dan sekolah, serta integrasi layanan dengan instansi kesehatan dan pendidikan. Melalui kerja sama tersebut, pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran bayi baru lahir atau peserta didik baru.

Selain itu, Disdukcapil juga telah mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem Disdukcapil yang memudahkan

masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Inovasi ini membantu mempercepat penerbitan dokumen sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Berikut disajikan tabel data kepemilikan akta kelahiran anak di Kabupaten Tangerang berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.3.1. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Memiliki	Belum Memiliki	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	35.678	2.459	93,55%
Cikupa	59.094	3.796	93,96%
Cisauk	26.717	2.449	91,60%
Cisoka	29.476	2.560	92,01%
Curug	49.013	3.227	93,82%
Gunung Kaler	15.100	2.150	87,54%
Jambe	17.580	1.356	92,84%
Jayanti	20.102	1.952	91,15%
Kelapa Dua	40.938	3.154	92,85%
Kemiri	14.620	2.080	87,54%
Kosambi	29.963	2.639	91,91%
Kresek	19.379	2.357	89,16%
Kronjo	16.492	4.013	80,43%
Legok	37.152	3.426	91,56%
Mauk	25.539	2.900	89,80%
Mekar Baru	11.283	2.774	80,27%
Pagedangan	31.550	2.696	92,13%
Pakuhaji	34.749	4.720	88,04%
Panongan	39.107	2.666	93,62%
Pasar Kemis	67.650	4.192	94,16%
Rajeg	57.193	5.507	91,22%
Sepatan	32.291	3.768	89,55%
Sepatan Timur	30.195	3.317	90,10%
Sindang Jaya	28.692	2.385	92,33%
Solear	31.142	2.438	92,74%
Sukadiri	18.662	2.195	89,48%
Sukamulya	20.581	2.031	91,02%
Teluknaga	45.570	6.524	87,48%
Tigaraksa	50.512	2.797	94,75%
Total	**936.020**	**88.528**	**91,36%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025



Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tangerang telah mencapai persentase yang cukup tinggi dan mendekati target nasional. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil anak yang belum memiliki akta kelahiran, terutama di wilayah perdesaan atau keluarga dengan tingkat mobilitas tinggi, seperti pekerja migran.

Pemerintah daerah terus berupaya menekan angka tersebut dengan memperluas kolaborasi lintas sektor, memperkuat peran Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye publik.

Dengan adanya akta kelahiran bagi setiap anak, maka hak identitas hukum anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

2.4. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap keberadaan anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah. Kartu ini berfungsi sebagai identitas diri anak dan menjadi sarana penting untuk memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi. Dengan adanya KIA, setiap anak dapat diakui secara administratif sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Penerbitan KIA merupakan implementasi dari amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang menegaskan pentingnya pendataan anak secara menyeluruh



dan terintegrasi. Di Kabupaten Tangerang, program KIA dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui layanan reguler maupun inovasi pelayanan berbasis jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa.

Hingga tahun 2024, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh kerja sama lintas sektor antara Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Desa yang aktif mendukung kegiatan perekaman dan distribusi KIA bagi anak-anak. KIA tidak hanya menjadi identitas formal, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas, seperti potongan harga di tempat rekreasi, toko buku, layanan transportasi, dan lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berikut disajikan tabel kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Tangerang berdasarkan kecamatan:

Tabel 2.4.1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Memiliki	Belum Memiliki	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	22.478	14.752	60,38%
Cikupa	41.122	20.364	66,88%
Cisauk	18.464	9.947	64,99%
Cisoka	16.245	15.074	51,87%
Curug	33.785	17.180	66,29%
Gunung Kaler	7.726	9.286	45,42%
Jambe	12.012	6.465	65,01%
Jayanti	11.142	10.394	51,74%
Kelapa Dua	25.270	17.371	59,26%
Kemiri	8.372	8.071	50,92%
Kosambi	17.653	14.276	55,29%
Kresek	10.935	10.427	51,19%
Kronjo	10.502	9.713	51,95%
Legok	20.875	18.616	52,86%
Mauk	14.877	13.013	53,34%
Mekar Baru	7.267	6.593	52,43
Pagedangan	19.051	14.255	57,20%



Kecamatan	Memiliki	Belum Memiliki	Persentase
Pakuhaji	22.102	16.522	57,22%
Panongan	25.222	15.458	62,00%
Pasar Kemis	37.052	32.611	53,19%
Rajeg	36.238	25.242	58,94%
Sepatan	21.055	14.273	59,60%
Sepatan Timur	19.319	13.593	58,70%
Sindang Jaya	15.217	15.296	49,87%
Solear	19.589	13.192	59,76%
Sukadiri	11.377	9.173	55,36%
Sukamulya	11.692	10.558	52,55%
Teluknaga	30.684	20.483	59,97%
Tigaraksa	35.920	15.966	69,23%
Total	**583.243**	**418.164**	**58,24%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA semakin meningkat. Sebagian besar anak di wilayah perkotaan telah memiliki KIA, sementara wilayah perdesaan masih membutuhkan perluasan jangkauan layanan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat inovasi pelayanan keliling dan digitalisasi KIA melalui sistem online service yang memudahkan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Selain itu, kegiatan integrasi KIA dengan layanan pendidikan juga menjadi strategi efektif dalam memperluas kepemilikan kartu ini. Misalnya, penerbitan KIA dilakukan bersamaan dengan pendaftaran siswa baru di tingkat PAUD, SD, maupun SMP. Strategi ini tidak hanya mempercepat proses penerbitan tetapi juga meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya dokumen identitas anak.

Melalui perluasan kepemilikan KIA, Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas hukum yang jelas sejak dini, sekaligus memperoleh akses



yang lebih luas terhadap layanan publik. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

2.5. Hak Akses Informasi dan Literasi Digital

Perkembangan teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan pola komunikasi anak-anak di era modern. Akses terhadap informasi kini semakin terbuka luas melalui berbagai platform digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi pembelajaran daring. Namun, kemudahan tersebut juga menuntut adanya kemampuan literasi digital yang kuat agar anak-anak mampu menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan produktif.

Di Kabupaten Tangerang, hak anak untuk memperoleh informasi yang layak menjadi bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya penyediaan informasi yang ramah anak serta perlindungan dari pengaruh negatif media massa dan teknologi digital.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, serta Forum Anak Kabupaten Tangerang, telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan literasi digital bagi anak-anak, remaja, guru, dan orang tua. Program-program tersebut bertujuan agar anak-anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi *"digital citizen"* yang cerdas, kritis, dan beretika di ruang maya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:



1. Pelatihan Literasi Digital Anak dan Remaja, yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA, untuk mengenalkan etika digital, keamanan siber, dan pencegahan perundungan daring *(cyberbullying).*
2. Kampanye Internet Aman untuk Anak dan Keluarga, melalui media sosial pemerintah dan kegiatan penyuluhan di sekolah.
3. Pojok Internet Publik dan Ruang Digital Ramah Anak, yang disediakan di beberapa kantor kecamatan dan perpustakaan daerah agar anak-anak dapat mengakses informasi edukatif dengan aman.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memperkuat infrastruktur digital melalui perluasan jaringan internet publik gratis (*Wi-Fi* Tangerang Gemilang), terutama di wilayah pedesaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital antarwilayah dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan pembelajaran berbasis teknologi.

Tabel 2.5.1. Jumlah Jaringan Internet Publik Gratis (*Wifi* Tangerang Gemilang) Tahun 2024

No	Lokasi	Titik Koordinat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Setda	-6.259229591882827, 106.48325973197103	16
2	GUD	-6.272706573863287, 106.48525759527429	25
3	BKPSDM	-6.26784770022629, 106.4814258225371	9
4	BPKAD	-6.26784770022629, 106.4814258225371	8
5	Lab DLHK	-6.267694464981213, 106.4807135304846	1
6	DPMPD	-6.267961570444462, 106.48175522253705	6
7	DP3A	-6.2672381642048105, 106.48165733048457	5



No	Lokasi	Titik Koordinat	Jumlah
8	DPPKB	-6.267480617294904, 106.48225336856328	6
9	BPBD	-6.2300866587180295, 106.56109824560669	9
10	DPMPTSP	-6.2678793528354335, 106.48252237651089	4
11	Inspektorat	-6.266720933984792, 106.48411928390541	6
12	Bappeda	-6.267204175774606, 106.48477043787918	1
13	*Smart Building*	-6.266411472557031, 106.48592326922065	7
14	Bapenda	-6.275952163135462, 106.48353634255035	5
15	Satpol-PP	-6.275528350370786, 106.48401633788005	5
16	Kesbangpol	-6.272766, 106.483575	8
17	Gedung Arsip	-6.272239012934568, 106.48270279174986	2
18	Disdik	-6.273218949758046, 106.48208276034582	6
19	Perpustakaan	-6.272469564185042, 106.48255170423656	4
20	PU	-6.272469564185042, 106.48352322523468	33
21	DISHUB	-6.180000419207409, 106.4449154378689	7
22	Disnaker	-6.177824253330055, 106.44714703280708	9
23	UPT BMD BPKAD Kab. Tangerang	-6.2641292723038715, 106.48627551458912	7
24	Pendopo Wakil Bupati Tangerang	-6.259456767033156, 106.48393323048363	7
25	Gedung Diklat Pemda Kitri Bakti	-6.260143476928116, 106.58113096139233	9
26	Pendopo Bupati Tangerang	-6.176524344830795, 106.62924934581598	7
27	UPTD Balai Latihan Kerja Disnaker	-6.219229420136553, 106.39006611513683	7
28	UPTD Panti Sosial	-6.03154367568004, 106.42304370622337	7
29	Kantor Metrologi Legal Balaraja	-6.189676663251208, 106.46215850663289	7
30	Kejaksaan	-6.275604475952567, 106.48498615322218	7



No	Lokasi	Titik Koordinat	Jumlah
31	Al-Amjad	-5.489349530509114, 106.42550010211566	1
32	Kec. Tigaraksa	-6.261349, 106.465971	8
33	Kec. Sukamulya	-6.164632, 106.422904	7
34	Kec. Jayanti	-6.1970921814516355, 106.38862954830489	10
35	Kec. Curug	-6.247769, 106.563795	8
36	Kec. Balaraja	-6.190854, 106.466044	7
37	Kec. Kresek	-6.133979, 106.379113	7
38	Kec. Gunung Kaler	-6.091212, 106.361822	7
39	Kec. Jambe	-6.315949, 106.483078	12
40	Kec. Panongan	-6.280143, 106.52946	7
41	Kec. Legok	-6.3111, 106.571334	9
42	Kec. Cisauk	-6.323516, 106.641053	9
43	Kec. Mauk	-6.057634, 106.512674	7
44	Kec. Kemiri	-6.100309, 106.468568	7
45	Kec. Mekar Baru	-6.062453, 106.384863	7
46	Kec. Kronjo	-6.061973, 106.427729	7
47	Kec Pagedangan	-6.295437, 106.627032	7
48	Kec. Kelapa Dua	-6.2467880000000005, 106.612135	8
49	Kec. Pasar Kemis	-6.155932, 106.549275	9
50	Kec. Rajeg	-6.12578, 106.526607	7
51	Kec. Sindang Jaya	-6.165548, 106.499047	7
52	Kec. Cikupa	-6.240566, 106.492711	8
53	Kec. Sepatan	-6.118656, 106.574722	7
54	Kec. Sepatan Timur	-6.122033, 106.605867	8
55	Kec. Solear	-6.296534, 106.413407	8
56	Kec. Cisoka	-6.263033, 106.422555	9
57	Kec. Sukadiri	-6.066094, 106.557772	8
58	Kec. Pakuhaji	-6.062462, 106.596041	7
59	Kec. Teluknaga	-6.070785, 106.647482	8
60	Kec. Kosambi	-6.074458, 106.6666	9
61	Kel. Balaraja	-6.18933, 106.456304	4
62	Pos BPBD Balaraja	-6.178145, 106.447977	2
63	Kel. Sukamulya	-6.242785, 106.513203	3
64	Kel. Bunder	-6.204112, 106.550168	2
65	Gerai Tangerang Gemilang	-6.218197695055282, 106.49924346855748	2
66	Kel. Cisauk	-6.326516, 106.61995	2
67	Pos BPBD Cisoka	-6.262698, 106.421981	1
68	Kel. Curug Kulon	-6.262279, 106.557854	4
69	Kel. Sukabakti	-6.255527, 106.568745	2

No	Lokasi	Titik Koordinat	Jumlah
70	Kel. Binong	-6.239982, 106.581059	3
71	Kel. Pakulonan Barat	-6.24082482897735, 106.6340978918497	2
72	Kel. Bencongan Indah	-6.221794, 106.602675	1
73	Kel. Kelapa Dua	-6.236108, 106.611061	2
74	Kel. Bojong Nangka	-6.254873, 106.599533	5
75	Kel. Bencongan	-6.211703, 106.598106	4
76	Pos Bpbd Kelapa Dua	-6.221243, 106.602827	1
77	*Sport Center* Kelapa Dua	-6.258736487931649, 106.60595167143006	3
78	Kel. Dadap	-6.090476, 106.693705	4
79	Kel. Salembaran Jaya	-6.0755673340422405, 106.66925869922507	5
80	Kel. Kosambi Barat	-6.077973, 106.694761	3
81	Pos BPBD Kosambi	-6.074784, 106.675388	4
82	Pos BPBD Kronjo	-6.065353, 106.421477	1
83	Kel. Babakan	-6.299164, 106.590503	3
84	Kel. Mauk Timur	-6.054854, 106.511614	2
85	Pos BPBD Mauk	-6.061364, 106.505634	1
86	Kel. Medang	-6.0826329999999995, 106.592296	3
87	Kel. Pakuhaji	-6.082011117293135, 106.59225352251538	2
88	Pos BPBD Pakuhaji	-6.072208, 106.59125	1
89	Kel. Mekarbakti	-6.2615108248920945, 106.52437723540034	4
90	Kel. Kutajaya	-6.172269, 106.561523	3
91	Kel. Kutabumi	-6.148873, 106.562905	2
92	Kel. Kutabaru	-6.152685, 106.580359	5
93	Kel. Sindangsari	-6.145733, 106.535633	2
94	Pos Bpbd Pasar Kemis	-6.165075, 106.536496	3
95	Kel. Sukatani	-6.13034, 106.526528	4
96	Kel. Sepatan	-6.123157, 106.581289	4
97	Pos BPBD Sepatan	-6.116811, 106.574569	1
98	Kel. Tigaraksa	-6.268071, 106.467725	4
99	Kel. Kaduagung	-6.264943, 106.490502	2
100	Pos BPBD Tigaraksa	-6.272652, 106.485774	5

Sumber: Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Upaya peningkatan literasi digital ini juga sejalan dengan strategi nasional Gerakan Literasi Digital Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo RI. Melalui



kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Tangerang berkomitmen menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan memberdayakan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri.

Dengan meningkatnya kesadaran dan keterampilan digital di kalangan anak-anak dan keluarga, diharapkan akan terbentuk generasi muda Kabupaten Tangerang yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan dunia digital yang positif menuju Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

2.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

Meskipun capaian pemenuhan hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Tangerang menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sosial, budaya, dan struktural, yang memengaruhi tingkat pemenuhan hak anak dan perempuan secara menyeluruh.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Masih adanya anak yang belum memiliki dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), terutama di wilayah perdesaan dan keluarga dengan mobilitas tinggi.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas hukum anak, yang menyebabkan keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan.



3. Kesenjangan literasi digital di kalangan anak dan keluarga, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi.
4. Belum meratanya fasilitas publik ramah anak dan ruang digital aman, yang dapat mendukung kebebasan berekspresi dan partisipasi anak secara positif.
5. Kurangnya integrasi data lintas sektor, yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan sistem informasi gender dan anak yang komprehensif, mutakhir, dan terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta organisasi perangkat daerah lainnya telah menetapkan beberapa arah kebijakan strategis, antara lain:

1. Memperkuat layanan administrasi kependudukan berbasis jemput bola dan digitalisasi layanan, agar setiap anak dan perempuan memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan gratis.
2. Meningkatkan integrasi data terpilah gender dan anak antar-OPD, melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terkoordinasi dan aman.
3. Mengembangkan program literasi digital berkelanjutan bagi anak, orang tua, dan guru, guna memperkuat kemampuan penggunaan teknologi yang etis, aman, dan produktif.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penguatan fasilitas publik yang ramah anak, seperti pojok baca digital, ruang kreatif, dan area bermain aman.



5. Memperluas kemitraan dengan lembaga pendidikan dan forum anak, dalam menyosialisasikan hak-hak sipil, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab bermedia digital bagi anak-anak dan remaja.
6. Melalui arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Tangerang dapat terus memperkuat fondasi pembangunan sosial yang berorientasi pada kesetaraan, inklusivitas, dan keberlanjutan sejalan dengan semangat "Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak."



BAB III
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

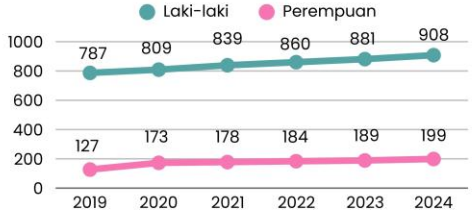
3.1. Jumlah Kepala Keluarga
3.2. Pengasuhan Alternatif dan Anak Terlantar
3.3. Panti Sosial Anak dan Lembaga Pengasuhan
3.4. Perkawinan Anak
3.5. Tantangan dan Arah Kebijakan

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANTERNATIF

JUMLAH KEPALA KELUARGA TAHUN 2019–2024

(angka dalam ribu)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
914	982	1.018	1.045	1.070	1.107





Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JUMLAH ANAK & BALITA TERLANTAR TAHUN 2024

Sumber: Dinas Sosial



Anak Terlantar

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
29.927	32.033

TOTAL

61.960



Balita Terlantar

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2.699	3.021

TOTAL

5.720

JUMLAH PANTI SOSIAL TAHUN 2024

45 Unit



BAB III

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

3.1. Jumlah Kepala Keluarga

Data mengenai jumlah kepala keluarga memberikan gambaran umum tentang struktur sosial dan demografi masyarakat Kabupaten Tangerang. Kepala keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kesejahteraan anggota keluarga, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan anak. Dengan semakin meningkatnya urbanisasi, industrialisasi, dan mobilitas penduduk, komposisi rumah tangga di Kabupaten Tangerang juga menunjukkan dinamika yang signifikan dari waktu ke waktu.

Kepala keluarga di Kabupaten Tangerang tidak hanya mencerminkan status administratif dalam kartu keluarga, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi seseorang terhadap anggota keluarganya. Dalam konteks pembangunan yang berperspektif gender, penting untuk memahami komposisi kepala keluarga laki-laki dan perempuan karena hal ini menunjukkan sejauh mana perempuan berperan sebagai penopang utama dalam rumah tangga.

Pendataan terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi sangat penting. Perempuan yang menjadi kepala keluarga seringkali menghadapi tantangan ganda mereka tidak hanya harus memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi juga menjalankan fungsi pengasuhan anak. Oleh karena itu, keberadaan perempuan kepala keluarga perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi daerah.



Seiring dengan visi Kabupaten Tangerang “Semakin Gemilang”, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat basis data keluarga yang akurat dan mutakhir melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data tersebut menjadi pijakan penting bagi pengambilan keputusan lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

Selain itu, program pembangunan keluarga yang dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program Ketahanan Keluarga, Sekolah Keluarga, dan Kampung Keluarga Berkualitas. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat peran kepala keluarga dalam membangun lingkungan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan ramah anak.

Dari perspektif pembangunan sosial, peningkatan jumlah kepala keluarga juga berkaitan erat dengan fenomena pemekaran rumah tangga baru, migrasi penduduk, serta pernikahan usia produktif. Kabupaten Tangerang sebagai wilayah penyangga Ibu Kota mengalami pertumbuhan keluarga baru setiap tahun akibat tingginya arus pendatang yang bekerja di sektor industri dan jasa.

Dengan demikian, analisis terhadap jumlah dan karakteristik kepala keluarga menjadi dasar untuk memahami perubahan sosial masyarakat serta mengarahkan kebijakan yang responsif terhadap gender dan anak. Pendekatan berbasis data keluarga juga membantu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki

dampak nyata terhadap kesejahteraan anak dan penguatan fungsi keluarga.

Tabel 3.1.1. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	787.365	127.301	914.666
2020	809.327	173.403	982.730
2021	839.587	178.808	1.018.395
2022	860.405	184.724	1.045.129
2023	881.835	189.058	1.070.893
2024	908.275	199.276	1.107.551

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 3.1.2. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	34.025	7.197	41.222
Cikupa	57.968	11.744	69.712
Cisauk	24.703	5.580	30.283
Cisoka	26.440	6.133	32.573
Curug	48.673	11.026	59.699
Gunung Kaler	15.352	3.870	19.222
Jambe	15.113	3.203	18.316
Jayanti	19.315	4.651	23.966
Kelapa Dua	45.081	11.295	56.376
Kemiri	13.237	3.573	16.810
Kosambi	30.969	7.714	38.683
Kresek	19.653	5.161	24.814
Kronjo	17.889	5.468	23.357
Legok	33.410	6.884	40.294
Mauk	24.682	5.887	30.569
Mekar Baru	11.743	3.377	15.120
Pagedangan	31.251	7.203	38.454
Pakuhaji	35.736	7.217	42.953
Panongan	35.998	6.664	42.662
Pasar Kemis	69.232	13.707	82.939
Rajeg	53.242	9.501	62.743
Sepatan	30.835	6.589	37.424
Sepatan Timur	29.631	5.908	35.539
Sindang Jaya	26.554	5.218	31.772

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Solear	28.057	6.147	34.204
Sukadiri	18.796	4.252	23.048
Sukamulya	20.417	4.526	24.943
Teluknaga	46.164	10.628	56.792
Tigaraksa	44.109	8.953	53.062
Total	**908.275**	**199.276**	**1.107.551**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

3.2. Pengasuhan Alternatif dan Anak Terlantar

Pengasuhan anak merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, nilai moral, dan kepribadian seorang anak. Idealnya, pengasuhan dilakukan oleh orang tua kandung dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam kondisi keluarga yang utuh. Sebagian anak di Kabupaten Tangerang menghadapi situasi kehilangan pengasuhan karena berbagai faktor, seperti kematian orang tua, perceraian, kemiskinan ekstrem, atau ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan sistem pengasuhan alternatif agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara layak.

Pengasuhan alternatif merupakan upaya negara dan masyarakat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang yang memadai meskipun tidak diasuh oleh orang tua kandungnya. Bentuk pengasuhan alternatif dapat berupa pengasuhan oleh keluarga besar, orang tua asuh, maupun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bernaung di bawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat kebijakan ini sesuai dengan amanat:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,



- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, serta
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pengasuhan alternatif harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* serta menjamin hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang.

Di Kabupaten Tangerang, pengasuhan alternatif dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga *(family-based care)* dan masyarakat *(community-based care).* Pemerintah berupaya mencegah anak masuk ke panti sosial dengan mengedepankan penguatan keluarga dan pemberian bantuan sosial kepada orang tua atau wali yang masih memungkinkan untuk melakukan pengasuhan.

Namun, bagi anak-anak yang benar-benar kehilangan pengasuhan, pemerintah daerah bekerja sama dengan LKSA, yayasan sosial, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan tempat tinggal, pendidikan, serta pembinaan moral.

Tabel 3.2.1. Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	560	699	1.259
Cikupa	867	990	1.857
Cisauk	1.312	1.409	2.721
Cisoka	1.592	1.682	3.274
Curug	742	801	1.543
Gunung Kaler	757	844	1.601
Jambe	1.310	1.361	2.671
Jayanti	705	781	1.486
Kelapa Dua	265	314	579
Kemiri	1.433	1.436	2.869



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kosambi	132	147	279
Kresek	705	745	1.450
Kronjo	284	301	585
Legok	1.837	2.008	3.845
Mauk	946	1.068	2.014
Mekar Baru	274	263	537
Pagedangan	1.125	1.221	2.346
Pakuhaji	2.060	2.175	4.235
Panongan	953	997	1.950
Pasar Kemis	578	653	1.231
Rajeg	2.160	2.174	4.334
Sepatan	630	663	1.293
Sepatan Timur	1.044	1.062	2.106
Sindang Jaya	1.857	1.965	3.822
Solear	1.917	1.985	3.902
Sukadiri	385	436	821
Sukamulya	429	533	962
Teluknaga	1.316	1.452	2.768
Tigaraksa	1.752	1.868	3.620
Total	**29.927**	**32.033**	**61.960**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Tabel 3.2.2. Jumlah Anak Balita Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	49	55	104
Cikupa	73	76	149
Cisauk	123	113	236
Cisoka	142	138	280
Curug	73	62	135
Gunung Kaler	79	79	158
Jambe	123	141	264
Jayanti	36	58	94
Kelapa Dua	22	23	45
Kemiri	131	138	269
Kosambi	10	12	22
Kresek	62	80	142
Kronjo	21	25	46
Legok	153	155	308
Mauk	106	136	242
Mekar Baru	20	23	43



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pagedangan	85	101	186
Pakuhaji	172	236	408
Panongan	89	100	189
Pasar Kemis	60	60	120
Rajeg	228	260	488
Sepatan	52	54	106
Sepatan Timur	104	117	221
Sindang Jaya	191	220	411
Solear	165	183	348
Sukadiri	42	52	94
Sukamulya	48	52	100
Teluknaga	101	117	218
Tigaraksa	139	155	294
Total	**2.699**	**3.021**	**5.720**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Selain pengasuhan alternatif, perhatian khusus juga diberikan kepada anak dan balita terlantar, yaitu anak-anak yang kehilangan pengasuhan, tidak mendapatkan perlindungan, atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka sering kali berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melaksanakan berbagai program, seperti:

- Rehabilitasi sosial anak dan balita terlantar;
- Penyaluran bantuan sosial untuk keluarga asuh;
- Pembinaan panti asuhan dan LKSA agar memenuhi standar pengasuhan anak berbasis hak;
- Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga filantropi melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan anak-anak terlantar.

Upaya tersebut sejalan dengan visi daerah, yaitu mewujudkan Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak. Penguatan sistem pengasuhan alternatif dan penanganan anak



terlantar bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia di masa depan.

3.3. Panti Sosial Anak dan Lembaga Pengasuhan

Panti sosial anak dan lembaga pengasuhan merupakan bagian penting dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Tangerang. Keberadaannya menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, ditelantarkan, atau berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial berperan aktif dalam pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), panti asuhan, dan rumah singgah anak. Kelembagaan ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, pendidikan informal, dan rehabilitasi sosial.

Secara umum, panti sosial anak di Kabupaten Tangerang tersebar di beberapa kecamatan, baik yang dikelola oleh pemerintah, yayasan, maupun lembaga keagamaan. Jumlah lembaga ini mengalami peningkatan seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengasuhan berbasis hak anak.

Meski demikian, pemerintah daerah terus menekankan bahwa pengasuhan di dalam keluarga merupakan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak, sedangkan panti atau LKSA sebaiknya menjadi pilihan terakhir jika pengasuhan keluarga tidak memungkinkan.



Untuk memastikan pelayanan yang sesuai dengan standar nasional, pemerintah mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Melalui peraturan tersebut, setiap panti sosial dan LKSA diharapkan menerapkan prinsip:

- Non-diskriminatif tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau status sosial anak.
- Berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
- Menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

Selain memberikan layanan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan informal, beberapa panti sosial juga menyediakan layanan pengasuhan berbasis keterampilan *(life skill),* seperti menjahit, teknologi informasi, dan pelatihan kewirausahaan sederhana. Pendekatan ini bertujuan menyiapkan anak asuh agar mandiri setelah keluar dari lembaga.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan seluruh lembaga pengasuhan memenuhi syarat administrasi dan teknis, seperti izin operasional, standar sanitasi, kelayakan sarana, serta keberadaan tenaga pendamping profesional.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola lembaga sosial agar tidak hanya berfungsi

sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai ruang tumbuh kembang yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Selain lembaga berbasis pemerintah, partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan juga sangat berperan dalam pengasuhan alternatif.

Banyak panti sosial di Kabupaten Tangerang yang mengelola kegiatan berbasis nilai-nilai religius dan sosial kemanusiaan, seperti kegiatan pendidikan Al-Qur'an, pembinaan akhlak, serta pelatihan keterampilan.

Dukungan dari masyarakat dan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) turut memperkuat keberlanjutan layanan sosial bagi anak-anak di lembaga pengasuhan.

Tabel 3.3.1. Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)
Balaraja	3
Cikupa	2
Cisauk	4
Cisoka	2
Curug	0
Gunung Kaler	0
Jambe	0
Jayanti	0
Kelapa Dua	8
Kemiri	0
Kosambi	0
Kresek	0
Kronjo	1
Legok	1
Mauk	4
Mekar Baru	0
Pagedangan	3
Pakuhaji	0
Panongan	3
Pasar Kemis	5
Rajeg	2

Kecamatan	Jumlah
Sepatan	1
Sepatan Timur	0
Sindang Jaya	0
Solear	1
Sukadiri	0
Sukamulya	0
Teluknaga	0
Tigaraksa	5
Total	45

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Dengan adanya penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak ini, diharapkan seluruh anak di Kabupaten Tangerang dapat memperoleh hak pengasuhan yang layak, berkeadilan, dan bermartabat sebagai wujud nyata menuju Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

3.4. Perkawinan Anak

Perkawinan anak masih menjadi salah satu isu strategis dalam perlindungan anak di Kabupaten Tangerang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kehidupan anak yang menikah di usia dini, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi keluarga, serta siklus kemiskinan antar generasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari risiko yang timbul akibat perkawinan dini, seperti kehamilan berisiko tinggi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.



Meskipun angka perkawinan anak di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, kasus-kasus masih ditemukan di beberapa wilayah, terutama pada daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi terbatas. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, sebagian besar permohonan dispensasi nikah diajukan karena faktor ekonomi, dorongan sosial-budaya, serta kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak perkawinan usia anak.

Faktor-faktor pendorong perkawinan anak di Kabupaten Tangerang antara lain:

- Faktor ekonomi, di mana keluarga menganggap perkawinan sebagai solusi mengurangi beban ekonomi.
- Faktor budaya dan norma sosial, yang masih memandang perkawinan sebagai prestise atau jalan "pengaman" terhadap perilaku remaja.
- Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan literasi gender, yang membuat remaja rentan mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang.
- Pergaulan bebas dan pengaruh media digital, yang kadang mendorong hubungan tanpa pemahaman nilai dan tanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berkomitmen untuk menekan angka perkawinan anak melalui berbagai kebijakan preventif dan kolaboratif lintas sektor, antara lain:

- Program Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, dan masyarakat.



- Kampanye “Stop Perkawinan Anak” yang dilaksanakan secara masif melalui media sosial, kegiatan sekolah, dan forum anak daerah.
- Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan komunitas.
- Koordinasi antara DP3A, Kemenag, dan Pengadilan Agama untuk memperketat proses pemberian dispensasi nikah.

Selain itu, program Sekolah Ramah Anak dan Kampung Keluarga Berkualitas juga turut mendukung pencegahan perkawinan anak dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan.

Tabel 3.4.1. Jumlah Dispensasi Nikah Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)
Balaraja	1
Cikupa	3
Cisauk	1
Cisoka	0
Curug	0
Gunung Kaler	0
Jambe	1
Jayanti	1
Kelapa Dua	1
Kemiri	0
Kosambi	0
Kresek	0
Kronjo	0
Legok	1
Mauk	0
Mekar Baru	0
Pagedangan	0
Pakuhaji	4
Panongan	2
Pasar Kemis	1
Rajeg	1
Sepatan	5
Sepatan Timur	6

Kecamatan	Jumlah
Sindang Jaya	1
Solear	1
Sukadiri	0
Sukamulya	0
Teluknaga	1
Tigaraksa	4
Total	**35**

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, 2025

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga terus berupaya memperkuat mekanisme perlindungan anak melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Melalui kerja sama antara Forum Anak Daerah, Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan Desa/Kelurahan Layak Anak, dilakukan edukasi berkelanjutan untuk membangun pemahaman bahwa setiap anak berhak menikmati masa tumbuh kembangnya tanpa tekanan untuk menikah dini.

Selain aspek hukum dan sosial, pendekatan agama juga menjadi bagian penting. Tokoh agama dan penyuluh Kemenag berperan dalam memberikan pemahaman bahwa pernikahan anak bukanlah solusi, melainkan potensi masalah baru jika dilakukan tanpa kesiapan fisik dan mental.

Upaya lintas sektor ini diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak hingga menuju zero case di masa mendatang. Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menjadikan wilayahnya sebagai daerah bebas perkawinan anak, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan lembaga keagamaan.

Dengan langkah yang berkesinambungan, Kabupaten Tangerang terus bergerak mewujudkan generasi muda yang sehat,



berdaya, dan terlindungi hak-haknya menuju Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.

3.5. Tantangan dan Arah Kebijakan

Pembangunan ketahanan keluarga dan perlindungan anak di Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun capaian indikator kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak menunjukkan kemajuan setiap tahunnya, namun masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian agar seluruh anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya kesenjangan ekonomi dan akses layanan sosial. Sebagian keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah dan perempuan kepala keluarga, belum sepenuhnya terjangkau oleh program perlindungan sosial. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Di sisi lain, literasi pengasuhan positif masih perlu diperluas. Sebagian masyarakat masih menerapkan pola asuh tradisional yang belum sepenuhnya berpihak pada hak-hak anak, sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan verbal maupun emosional dalam keluarga.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan lembaga pengasuhan alternatif yang layak. Tidak semua lembaga pengasuhan anak (LKSA atau panti sosial) memenuhi standar nasional dalam hal pelayanan, pendidikan, dan kesehatan anak. Beberapa lembaga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan finansial.



Selain itu, perkawinan anak juga masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun angka kasusnya menurun, praktik perkawinan dini masih terjadi karena faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampaknya.

Fenomena urbanisasi dan mobilitas penduduk turut memberikan pengaruh terhadap dinamika keluarga di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan kawasan industri dan pemukiman baru menyebabkan munculnya keluarga muda dengan pola pengasuhan yang berbeda, serta menurunnya interaksi sosial dalam komunitas.

Anak-anak dari keluarga migran sering kali mengalami kekosongan pengasuhan karena orang tua sibuk bekerja di luar rumah. Kondisi ini dapat memengaruhi kedekatan emosional dan kontrol sosial dalam keluarga.

Selain itu, koordinasi antar lembaga dan ketersediaan data terpadu anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Belum optimalnya integrasi data lintas sektor sering kali membuat program perlindungan anak berjalan secara parsial.

Padahal, data terpilah yang akurat sangat penting untuk merancang kebijakan yang berbasis bukti *(evidence-based policy)* dan tepat sasaran. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan arah kebijakan strategis untuk memperkuat peran keluarga, melindungi anak, dan membangun sistem pengasuhan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- Meningkatkan ketahanan dan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan produktif, dan bantuan sosial bagi keluarga miskin dengan anak.



- Memperluas edukasi parenting dan pengasuhan positif melalui Sekolah Keluarga, Puspaga, dan kegiatan penyuluhan berbasis masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas lembaga pengasuhan anak (LKSA) agar sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak.
- Melanjutkan kampanye pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, dan komunitas.
- Mengembangkan sistem data terpadu anak berbasis digital yang terintegrasi antar perangkat daerah.
- Mendorong kolaborasi multipihak pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam pelaksanaan program berbasis komunitas.
- Mengintegrasikan prinsip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak.

Melalui arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, lingkungan yang aman bagi anak, serta sistem pengasuhan yang inklusif dan berkeadilan menuju Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



BAB IV
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

4.1. Derajat Kesehatan Anak dan Balita
4.2. Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Anak
4.3. Kesehatan Ibu dan Reproduksi Remaja
4.4. Anak dengan Disabilitas dan Akses Pelayanan Kesehatan
4.5. Anak dari Keluarga Miskin dan Akses Jaminan Sosial Kesehatan
4.6. Sanitasi dari Lingkungan Sehat
4.7. Tantangan dan Arah Kebijakan

Tangerang Gemilang DP3A Kabupaten Tangerang

Kesehatan Dasar dan Kesehatan Anak



CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP TAHUN 2024

Sumber: *Dinas Kesehatan*

Jumlah Bayi* *Surviving Infant	Sudah Imunisasi
56.361	57.679

Persentase
102,3%



Jumlah Keluarga dengan Akses Sanitasi yang Layak Tahun 2024

1.094.674
Kepala Keluarga

BAB IV

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK

4.1. Derajat Kesehatan Anak dan Balita

Kesehatan anak merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang. Kondisi kesehatan anak, khususnya balita, menjadi perhatian penting karena kelompok usia ini masih sangat rentan terhadap gangguan kesehatan, baik yang berasal dari faktor lingkungan, pola asuh, gizi, maupun penyakit infeksi yang umum terjadi pada masa tumbuh kembang.

Sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar. Layanan tersebut mencakup Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, serta berbagai program intervensi gizi yang berfokus pada pencegahan stunting, gizi kurang, anemia, penyakit menular, dan deteksi dini tumbuh kembang. Program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Kelas Ibu Balita, pemantauan status gizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi bagian dari strategi komprehensif di tingkat desa hingga kabupaten.

Derajat kesehatan anak di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari meningkatnya cakupan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang yang lebih intensif, serta penurunan kasus gizi buruk. Selain itu, semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang menerapkan Pelayanan



Kesehatan Ramah Anak (PKRA) menambah kualitas pelayanan yang aman dan nyaman bagi anak.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian lintas sektor, antara lain:

- Masih ditemukannya kasus stunting dan balita dengan status gizi kurang.
- Penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA yang masih cukup sering terjadi.
- Ketimpangan akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin atau yang tinggal di wilayah padat penduduk.
- Kebutuhan peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pola asuh sehat dan gizi seimbang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terus diperkuat melalui sinergi tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, dan keluarga. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan seluruh anak di Kabupaten Tangerang mendapatkan kesempatan tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

Tabel 4.1.1. Data Kesehatan Anak Tahun 2024

Indikator	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)
Jumlah Kematian Neonatal	201	neonatal
Jumlah Bayi Mati	214	Bayi
Jumlah Balita Mati	11	Balita
Bayi baru lahir ditimbang	58.233	Bayi
Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	1.386	Orang
Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	58.196	neonatal
Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap)	57.246	neonatal
Bayi yang diberi ASI Eksklusif	80,00	%
Pelayanan kesehatan bayi	57.225	Bayi
Desa/Kelurahan UCI	92,00	%

Indikator	Jumlah	Satuan
Cakupan Imunisasi Campak/Rubela pada Bayi	115,7	%
Imunisasi dasar lengkap pada bayi	102,3	%
Bayi Mendapat Vitamin A	95,4	%
Anak Balita Mendapat Vitamin A	95,4	%
Balita Mendapatkan Vitamin A	95,4	%
Balita Memiliki Buku KIA	103,9	%
Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan	101,3	%
Balita ditimbang (D/S)	68,4	%
Balita Berat Badan Kurang (BB/U)	6,9	%
Balita pendek (TB/U)	5,3	%
Balita Gizi Kurang (BB/TB)	4,6	%
Balita Gizi Buruk (BB/TB)	1,1	%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI	100,0	%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs	100,0	%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA	100,0	%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,0	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

4.2. Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Anak

Imunisasi merupakan salah satu strategi preventif yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian anak akibat penyakit menular. Melalui imunisasi dasar lengkap, anak mendapatkan perlindungan optimal terhadap berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, pertusis, hepatitis, dan pneumonia.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program imunisasi secara berkelanjutan dengan pendekatan jemput bola, baik melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan Posyandu, sekolah, serta pelayanan di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak



dapat memperoleh imunisasi tepat waktu, tanpa terkendala jarak atau kondisi sosial ekonomi keluarga.

Selain program imunisasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan anak dilakukan melalui penguatan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak (PKRA) di Puskesmas dan rumah sakit. Program ini memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki ruang pelayanan yang aman, bebas kekerasan, inklusif bagi anak dengan disabilitas, serta didukung tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan ramah anak.

Penempatan tabel sebagai ringkasan data dicantumkan setelah uraian naratif berikut:

Tabel 4.2.1. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi *(Surviving Infant)*	Sudah Imunisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balaraja	Balaraja	1.229	1.201	97,7
2	Balaraja	Gembong	885	865	97,7
3	Jayanti	Jayanti	1.204	1.211	100,6
4	Tigaraksa	Tigaraksa	1.372	1.472	107,3
5	Tigaraksa	Pasir Nangka	1.413	1.445	102,3
6	Jambe	Jambe	948	823	86,8
7	Cisoka	Cisoka	1.662	2.010	120,9
8	Kresek	Kresek	1.223	1.223	100,0
9	Kronjo	Kronjo	1.117	1.757	157,3
10	Mauk	Mauk	1.557	1.318	84,6
11	Kemiri	Kemiri	868	868	100,0
12	Sukadiri	Sukadiri	1.135	1.165	102,6
13	Rajeg	Rajeg	1.868	2.072	110,9
14	Rajeg	Sukatani	1.337	1.490	111,4
15	Pasar Kemis	Kutabumi	2.367	2.388	100,9
16	Pasar Kemis	Pasar Kemis	1.982	2.122	107,1
17	Teluknaga	Teluknaga	1.840	1.835	99,7



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi *(Surviving Infant)*	Sudah Imunisasi	Persentase (%)
18	Teluknaga	Tegal angus	1.020	1.160	113,7
19	Kosambi	Kosambi	979	1.155	118,0
20	Kosambi	Salembaran Jaya	922	1.037	112,5
21	Pakuhaji	Pakuhaji	1.316	1.146	87,1
22	Pakuhaji	Sukawali	853	859	100,7
23	Sepatan	Sepatan	1.913	2.078	108,6
24	Curug	Curug	2.022	2.212	109,4
25	Curug	Binong	985	960	97,5
26	Cikupa	Cikupa	2.447	2.207	90,2
27	Cikupa	Pasir Jaya	1.115	1.115	100,0
28	Panongan	Panongan	2.214	3.369	152,2
29	Legok	Legok	1.224	1.230	100,5
30	Legok	Bojong Kamal	408	408	100,0
31	Legok	Caringin	484	360	74,4
32	Pagedangan	Pagedangan	1.894	1.944	102,6
33	Cisauk	Cisauk	756	767	101,5
34	Cisauk	Suradita	802	890	111,0
35	Sukamulya	Sukamulya	1.266	1.257	99,3
36	Kelapa Dua	Kelapa Dua	847	845	99,8
37	Kelapa Dua	Jl.Emas	677	681	100,6
38	Kelapa Dua	Jl.Kutai	195	208	106,7
39	Kelapa Dua	Bojong Nangka	1.135	1.135	100,0
40	Sindang Jaya	Sindang Jaya	1.628	1.634	100,4
41	Sepatan Timur	Kedaung Barat	1.806	1.917	106,1
42	Sepatan Timur	Cikuya	1.737	141	8,1
43	Gunung Kaler	Gunung Kaler	957	1.030	107,6
44	Mekar Baru	Mekar Baru	752	669	89,0
		TOTAL	**56.361**	**57.679**	**102,3**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

Peningkatan cakupan imunisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mencegah outbreak penyakit yang pernah muncul kembali seperti campak dan difteri. Upaya ini memerlukan



sinergi antara orang tua, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta pemerintah desa/kelurahan dalam memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi.

4.3. Kesehatan Ibu dan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi ibu dan remaja memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas generasi masa depan. Ibu yang sehat dan remaja yang memiliki pengetahuan reproduksi yang baik akan membawa dampak positif terhadap tumbuh kembang anak serta menurunkan risiko terjadinya masalah kesehatan jangka panjang.

Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan reproduksi melalui berbagai fasilitas seperti Puskesmas, sekolah, dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Program-program ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pubertas, kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan masa depan, serta pencegahan perilaku berisiko seperti pernikahan usia anak, kehamilan remaja, dan perilaku seksual yang tidak sehat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Pendidikan dalam memperkuat literasi kesehatan reproduksi dan gizi remaja. Salah satu program utama yang terus dioptimalkan adalah pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri secara rutin untuk mencegah anemia, yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kesehatan termasuk saat kehamilan di masa mendatang.

Tabel 4.3.1. Jumlah Remaja (Usia 10-18 Tahun) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	10.183	9.481	19.664



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cikupa	16.523	15.457	31.980
Cisauk	7.661	7.306	14.967
Cisoka	8.351	7.707	16.058
Curug	13.580	12.713	26.293
Gunung Kaler	4.232	3.940	8.172
Jambe	4.733	4.314	9.047
Jayanti	5.692	5.324	11.016
Kelapa Dua	12.036	11.091	23.127
Kemiri	3.964	3.715	7.679
Kosambi	8.707	8.080	16.787
Kresek	5.371	5.067	10.438
Kronjo	5.048	4.699	9.747
Legok	10.852	10.238	21.090
Mauk	6.953	6.676	13.629
Mekar Baru	3.293	3.124	6.417
Pagedangan	9.018	8.634	17.652
Pakuhaji	9.896	9.254	19.150
Panongan	11.424	10.524	21.948
Pasar Kemis	20.158	18.961	39.119
Rajeg	15.462	14.496	29.958
Sepatan	9.343	8.659	18.002
Sepatan Timur	8.268	7.764	16.032
Sindang Jaya	7.554	7.376	14.930
Solear	8.441	7.841	16.282
Sukadiri	4.799	4.528	9.327
Sukamulya	5.539	5.365	10.904
Teluknaga	13.184	12.615	25.799
Tigaraksa	13.846	13.166	27.012
Total	**264.111**	**248.115**	**512.226**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berbagai upaya komprehensif di atas diharapkan mampu mendorong remaja memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta pola hidup sehat yang mendukung perkembangan mereka menuju masa dewasa yang produktif dan berkualitas.

4.4. Anak dengan Disabilitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

Anak dengan disabilitas merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem pelayanan kesehatan.



Mereka menghadapi tantangan tambahan dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan bagi anak dengan disabilitas harus dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat layanan kesehatan inklusif melalui berbagai program yang bertujuan memastikan seluruh anak, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan terapi tumbuh kembang di Puskesmas, rumah sakit, serta klinik terapi swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Layanan yang diberikan meliputi terapi okupasi, fisioterapi, terapi wicara, asesmen perkembangan anak, serta konseling untuk orang tua. Dukungan ini sangat penting bagi anak dengan hambatan sensorik, intelektual, fisik, maupun ganda, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan fungsional dan kemandirilannya.

Dinas Kesehatan bersinergi dengan lembaga pendidikan khusus (SLB), organisasi penyandang disabilitas, rumah sakit, serta lembaga layanan sosial untuk memperluas cakupan dan kualitas layanan. Selain aspek medis, pendekatan holistik juga diperkuat dengan mengedepankan edukasi kepada keluarga agar mampu memahami kebutuhan tumbuh kembang anak secara lebih tepat.

Berikut ringkasan data mengenai jenis disabilitas anak dan layanan yang tersedia di Kabupaten Tangerang:

Tabel 4.4.1. Jumlah Anak Disabilitas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	10	20	30
Cikupa	6	39	45
Cisauk	9	21	30

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cisoka	20	22	42
Curug	10	20	30
Gunung Kaler	6	24	30
Jambe	11	20	31
Jayanti	12	22	34
Kelapa Dua	4	16	20
Kemiri	19	21	40
Kosambi	7	24	31
Kresek	8	25	33
Kronjo	7	30	37
Legok	37	37	74
Mauk	14	33	47
Mekar Baru	3	27	30
Pagedangan	8	34	42
Pakuhaji	5	1	6
Panongan	14	36	50
Pasar Kemis	3	28	31
Rajeg	10	20	30
Sepatan	39	60	99
Sepatan Timur	15	33	48
Sindang Jaya	16	16	32
Solear	20	10	30
Sukadiri	6	25	31
Sukamulya	9	21	30
Teluknaga	12	26	38
Tigaraksa	21	37	58
Total	**361**	**748**	**1.109**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Upaya penguatan fasilitas kesehatan inklusif ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh anak, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal (no one left behind) dalam memperoleh hak-haknya.

4.5. Anak dari Keluarga Miskin dan Akses Jaminan Sosial Kesehatan

Kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan anak untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Anak yang berasal dari keluarga miskin

dan rentan sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik karena hambatan biaya, kurangnya pengetahuan, maupun keterbatasan jaminan sosial yang dimiliki keluarga.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan terus memperluas kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan rentan. Upaya ini terutama menyasar keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta keluarga yang secara ekonomi terindikasi belum mampu tetapi belum memiliki jaminan kesehatan.

Selain jaminan kesehatan, berbagai bentuk dukungan tambahan juga diberikan, seperti program gizi tambahan untuk balita dan ibu hamil, bantuan pangan, bantuan susu, serta bantuan sosial bagi anak yang termasuk dalam kategori rentan. Program-program tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A, dan pemerintah kecamatan/desa.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi anak dari keluarga miskin serta kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Tangerang, disajikan ringkasan data berikut:

Tabel 4.5.1. Jumlah Kepala Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	1.537	212	1.749
Cikupa	2.746	261	3.007
Cisauk	2.268	360	2.628
Cisoka	3.115	417	3.532
Curug	1.990	195	2.185
Gunung Kaler	1.987	261	2.248
Jambe	3.189	260	3.449
Jayanti	1.638	264	1.902
Kelapa Dua	811	93	904

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kemiri	3.286	475	3.761
Kosambi	507	49	556
Kresek	1.217	291	1.508
Kronjo	863	104	967
Legok	4.153	447	4.600
Mauk	2.234	293	2.527
Mekar Baru	702	84	786
Pagedangan	2.742	395	3.137
Pakuhaji	4.981	598	5.579
Panongan	2.040	219	2.259
Pasar Kemis	1.424	155	1.579
Rajeg	5.122	561	5.683
Sepatan	1.527	158	1.685
Sepatan Timur	2.312	281	2.593
Sindang Jaya	5.159	517	5.676
Solear	4.647	629	5.276
Sukadiri	1.043	128	1.171
Sukamulya	1.199	146	1.345
Teluknaga	3.253	372	3.625
Tigaraksa	4.257	553	4.810
Total	**71.949**	**8.778**	**80.727**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Tabel 4.5.2. Jumlah Penerima Bantuan Iuran Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2024

Kecamatan	Jamkesmas (PBI Iuran)	Jaminan Sosial Daerah
(1)	(2)	(3)
Balaraja	24.505	3.414
Cikupa	24.951	3.924
Cisauk	40.721	7.557
Cisoka	17.621	5.229
Curug	30.874	7.096
Gunung Kaler	34.725	4.554
Jambe	30.587	3.070
Jayanti	50.928	4.240
Kelapa Dua	31.422	4.642
Kemiri	32.200	3.269
Kosambi	60.841	10.999
Kresek	23.776	2.504
Kronjo	61.088	7.542
Legok	36.022	2.345
Mauk	64.303	9.285
Mekar Baru	37.823	2.652

Kecamatan	Jamkesmas (PBI Iuran)	Jaminan Sosial Daerah
Pagedangan	13.724	3.832
Pakuhaji	17.080	5.000
Panongan	16.983	5.040
Pasar Kemis	27.536	6.901
Rajeg	20.205	4.966
Sepatan	21.930	4.226
Sepatan Timur	29.067	4.089
Sindang Jaya	13.828	1.654
Solear	25.207	6.445
Sukadiri	47.339	6.039
Sukamulya	26.277	6.740
Teluknaga	35.668	4.271
Tigaraksa	26.365	3.107
Total	**923.596**	**144.632**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Program jaminan sosial kesehatan ini berperan penting untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan esensial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan pemerataan layanan, memperluas cakupan kepesertaan JKN, serta memperkuat intervensi kesehatan bagi anak dari keluarga miskin guna mendukung terwujudnya SDM yang sehat dan berkualitas.

4.6. Sanitasi dari Lingkungan Sehat

Sanitasi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kesehatan anak. Lingkungan yang bersih dan akses sanitasi yang layak dapat mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan saluran pernapasan. Oleh karena itu, penguatan sanitasi dasar menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan balita yang lebih rentan terhadap risiko lingkungan.

Melalui program Open Defecation Free (ODF), pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk mengakhiri praktik



buang air besar sembarangan dan memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai di setiap rumah tangga. Selain itu, akses air bersih menjadi fokus utama yang dijaga kualitasnya melalui pemantauan rutin oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga terus ditingkatkan melalui sekolah, Posyandu, kelompok masyarakat, dan kader lingkungan. Edukasi ini meliputi kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta pengelolaan sampah yang baik. Sekolah-sekolah pun dilibatkan melalui program Sekolah Sehat untuk membentuk pola hidup bersih sejak dini.

Data tentang capaian sanitasi dan lingkungan sehat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6.1. Jumlah Keluarga dengan Akses Sanitasi yang Layak Menurut Puskesmas Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Balaraja	Balaraja	24.185
2	Balaraja	Gembong	16.968
3	Jayanti	Jayanti	23.769
4	Tigaraksa	Tigaraksa	26.727
5	Tigaraksa	Pasir Nangka	26.241
6	Jambe	Jambe	17.720
7	Cisoka	Cisoka	31.656
8	Kresek	Kresek	24.533
9	Kronjo	Kronjo	22.841
10	Mauk	Mauk	29.893
11	Kemiri	Kemiri	15.944
12	Sukadiri	Sukadiri	22.688
13	Rajeg	Rajeg	36.665
14	Rajeg	Sukatani	25.325
15	Pasar Kemis	Kutabumi	44.825
16	Pasar Kemis	Pasar Kemis	38.114
17	Teluknaga	Teluknaga	36.021
18	Teluknaga	Tegal angus	19.729



No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK
19	Kosambi	Kosambi	19.763
20	Kosambi	Salembaran Jaya	18.600
21	Pakuhaji	Pakuhaji	25.110
22	Pakuhaji	Sukawali	16.446
23	Sepatan	Sepatan	37.058
24	Curug	Curug	39.764
25	Curug	Binong	19.935
26	Cikupa	Cikupa	48.203
27	Cikupa	Pasir Jaya	21.509
28	Panongan	Panongan	42.262
29	Legok	Legok	23.097
30	Legok	Bojong Kamal	7.233
31	Legok	Caringin	9.216
32	Pagedangan	Pagedangan	37.997
33	Cisauk	Cisauk	15.168
34	Cisauk	Suradita	14.947
35	Sukamulya	Sukamulya	24.095
36	Kelapa Dua	Kelapa Dua	16.724
37	Kelapa Dua	Jl.Emas	13.389
38	Kelapa Dua	Jl.Kutai	3.895
39	Kelapa Dua	Bojong Nangka	22.368
40	Sindang Jaya	Sindang Jaya	31.121
41	Sepatan Timur	Kedaung Barat	35.276
42	Sepatan Timur	Cikuya	33.950
43	Gunung Kaler	Gunung Kaler	18.763
44	Mekar Baru	Mekar Baru	14.941
		TOTAL	**1.094.674**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Upaya peningkatan sanitasi ini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia pendidikan, serta pemerintah desa/kelurahan. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan layak bagi tumbuh kembang anak, sekaligus mendukung Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang ramah anak dan semakin gemilang.



4.7. Tantangan dan Arah Kebijakan

Meskipun berbagai program kesehatan anak di Kabupaten Tangerang telah menunjukkan perkembangan positif, sejumlah tantangan strategis masih perlu mendapatkan perhatian serius agar kualitas kesehatan anak dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah. Tantangan tersebut mencakup aspek aksesibilitas, kualitas layanan, dukungan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi derajat kesehatan anak.

Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi antara lain:

- Keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah perdesaan, pesisir, dan permukiman padat penduduk, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- Masih ditemukannya kasus stunting, gizi kurang, dan anemia pada remaja, yang menunjukkan perlunya intervensi gizi lebih komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya layanan kesehatan inklusif bagi anak dengan disabilitas, baik dari sisi tenaga medis yang terlatih maupun fasilitas terapi tumbuh kembang.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara konsisten di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar.
- Ketimpangan akses terhadap jaminan sosial kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan, yang berdampak pada kesulitan mengakses layanan kesehatan esensial.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan arah kebijakan sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak secara lebih



terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- Memperkuat layanan kesehatan dasar bagi ibu, anak, dan remaja, melalui peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan promotif–preventif.
- Memantapkan program percepatan penurunan stunting secara lintas sektor dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan layanan kesehatan primer.
- Mengembangkan layanan kesehatan inklusif dan ramah disabilitas, termasuk terapi tumbuh kembang, asesmen perkembangan, dan pendampingan keluarga.
- Memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial, terutama bagi keluarga dalam kategori DTKS.
- Menguatkan edukasi PHBS dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berbasis sekolah, Posyandu, dan komunitas, agar perilaku sehat terbentuk sejak usia dini.

Dengan berbagai strategi dan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menciptakan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing. Upaya ini sejalan dengan visi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



BAB V
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

5.1. Akses dan Partisipasi Pendidikan
5.2. Anak Putus Sekolah dan Upaya Penanganannya
5.3. Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus
5.4. Pemanfaatan Waktu Luang, Kreativitas, dan Budaya
5.5. Anak dalam Kegiatan Budaya dan Pelestarian Tradisi
5.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

Tangerang Gemilang DP3A Kabupaten

PENDIDIKAN
PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA



SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

Jumlah Murid (2024)

Laki-laki:
96.784

Perempuan:
87.307

Total:
184.091

Jumlah Sekolah (2024)

Negeri:
95

Swasta:
392

Jumlah Guru (2024)
5.807

SEKOLAH TINGKAT DASAR

Jumlah Murid (2024)

Laki-laki:
214.424

Perempuan:
198.305

Total:
412.729

Jumlah Sekolah (2024)

Negeri:
743

Swasta:
303

Jumlah Guru (2024)
13.070

BAB V

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

5.1. Akses dan Partisipasi Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak dan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya memastikan bahwa seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kondisi ekonomi, disabilitas, atau lokasi tempat tinggal.

Berbagai program strategis telah dijalankan, antara lain wajib belajar 12 tahun, perluasan pendidikan inklusif, penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, serta peningkatan kompetensi guru untuk menerapkan pembelajaran yang partisipatif, aman, dan ramah anak. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak dapat berkembang secara optimal dalam aspek akademik maupun karakter.

Sejumlah indikator pendidikan yang menjadi perhatian dalam analisis pembangunan anak meliputi:

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai jenjang pendidikan.
- Angka Melek Huruf sebagai cerminan kemampuan literasi dasar.
- Jumlah Anak Putus Sekolah yang masih memerlukan intervensi khusus.



- Kesenjangan Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin, baik dari sisi akses maupun capaian belajar.
- Ketersediaan dan Ekspansi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang mengedepankan keamanan, inklusivitas, dan partisipasi anak dalam proses belajar.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan juga memperkuat kolaborasi dengan sekolah, pemerintah kecamatan/desa, serta lembaga masyarakat untuk memperluas layanan pendidikan bagi anak rentan, termasuk anak dari keluarga miskin, anak dengan disabilitas, dan anak yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Program bantuan pendidikan, layanan pendidikan nonformal, dan penjangkauan anak rentan menjadi bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak.

Untuk memberikan gambaran umum kondisi pendidikan, ringkasan data disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2021-2024

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	99,60	97,79	69,14
2023	99,39	97,49	69,94
2022	98,68	97,02	69,95
2021	99,83	97,90	67,77

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 5.1.2. Jumlah Murid Sekolah Tingkat Dasar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	8.539	7.513	16.052
Cikupa	11.893	11.022	22.915
Cisauk	5.554	5.117	10.671
Cisoka	6.502	6.060	12.562
Curug	11.631	10.804	22.435



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Gunung Kaler	3.449	3.080	6.529
Jambe	3.710	3.450	7.160
Jayanti	4.221	3.831	8.052
Kelapa Dua	12.109	11.601	23.710
Kemiri	3.195	3.000	6.195
Kosambi	8.215	7.438	15.653
Kresek	4.200	3.949	8.149
Kronjo	4.169	3.775	7.944
Legok	7.009	6.485	13.494
Mauk	5.148	4.945	10.093
Mekar Baru	2.915	2.715	5.630
Pagedangan	7.538	6.932	14.470
Pakuhaji	8.278	7.289	15.567
Panongan	8.814	8.193	17.007
Pasar Kemis	15.938	14.906	30.844
Rajeg	14.127	12.971	27.098
Sepatan	7.577	6.932	14.509
Sepatan Timur	6.457	6.121	12.578
Sindang Jaya	6.458	5.925	12.383
Solear	7.002	6.403	13.405
Sukadiri	4.731	4.410	9.141
Sukamulya	3.935	3.735	7.670
Teluknaga	10.296	9.595	19.891
Tigaraksa	10.814	10.108	20.922
Total	214.424	198.305	412.729

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 5.1.3. Jumlah Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	3.016	2.816	5.832
Cikupa	4.208	3.816	8.024
Cisauk	2.442	2.024	4.466
Cisoka	3.122	2.736	5.858
Curug	5.640	5.346	10.986
Gunung Kaler	1.383	1.311	2.694
Jambe	1.596	1.278	2.874
Jayanti	3.406	2.979	6.385
Kelapa Dua	4.551	4.607	9.158
Kemiri	1.814	1.484	3.298
Kosambi	2.962	2.576	5.538



Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kresek	2.872	2.451	5.323
Kronjo	1.621	1.272	2.893
Legok	3.349	2.885	6.234
Mauk	2.051	1.885	3.936
Mekar Baru	1.664	1.490	3.154
Pagedangan	3.441	3.522	6.963
Pakuhaji	3.487	2.934	6.421
Panongan	3.425	3.114	6.539
Pasar Kemis	7.200	6.582	13.782
Rajeg	6.803	5.914	12.717
Sepatan	3.833	3.598	7.431
Sepatan Timur	2.372	2.053	4.425
Sindang Jaya	2.588	2.305	4.893
Solear	3.361	2.983	6.344
Sukadiri	2.147	1.631	3.778
Sukamulya	2.081	2.043	4.124
Teluknaga	5.029	4.896	9.925
Tigaraksa	5.320	4.776	10.096
Total	**96.784**	**87.307**	**184.091**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 5.1.4. Jumlah Sekolah Tingkat Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	28	8	36
Cikupa	41	24	65
Cisauk	17	3	20
Cisoka	29	14	43
Curug	31	24	55
Gunung Kaler	21	6	27
Jambe	16	1	17
Jayanti	18	8	26
Kelapa Dua	23	34	57
Kemiri	15	2	17
Kosambi	28	13	41
Kresek	26	6	32
Kronjo	24	0	24
Legok	27	2	29
Mauk	28	4	32
Mekar Baru	17	2	19
Pagedangan	27	7	34
Pakuhaji	36	8	44

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Panongan	26	15	41
Pasar Kemis	26	37	63
Rajeg	40	16	56
Sepatan	18	9	27
Sepatan Timur	19	5	24
Sindang Jaya	25	9	34
Solear	22	10	32
Sukadiri	18	2	20
Sukamulya	20	4	24
Teluknaga	39	10	49
Tigaraksa	38	20	58
Total	**743**	**303**	**1.046**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 5.1.5. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	4	7	11
Cikupa	5	21	26
Cisauk	3	5	8
Cisoka	3	18	21
Curug	5	17	22
Gunung Kaler	2	9	11
Jambe	1	4	5
Jayanti	2	11	13
Kelapa Dua	2	32	34
Kemiri	3	11	14
Kosambi	3	14	17
Kresek	3	10	13
Kronjo	2	4	6
Legok	3	11	14
Mauk	2	7	9
Mekar Baru	3	7	10
Pagedangan	3	9	12
Pakuhaji	4	16	20
Panongan	3	19	22
Pasar Kemis	7	31	38
Rajeg	3	24	27
Sepatan	4	16	20
Sepatan Timur	3	7	10
Sindang Jaya	2	12	14
Solear	7	8	15

Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sukadiri	1	9	10
Sukamulya	3	9	12
Teluknaga	4	23	27
Tigaraksa	5	21	26
Total	**95**	**392**	**487**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 5.1.6. Jumlah Guru Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Tingkat Dasar	Lanjutan Tingkat Pertama
(1)	(2)	(3)
Balaraja	537	226
Cikupa	771	298
Cisauk	251	156
Cisoka	393	188
Curug	661	303
Gunung Kaler	259	81
Jambe	194	60
Jayanti	311	189
Kelapa Dua	1.144	497
Kemiri	170	115
Kosambi	479	161
Kresek	307	151
Kronjo	255	82
Legok	383	157
Mauk	287	113
Mekar Baru	188	104
Pagedangan	382	220
Pakuhaji	470	223
Panongan	618	228
Pasar Kemis	1.069	508
Rajeg	672	290
Sepatan	353	198
Sepatan Timur	315	126
Sindang Jaya	433	154
Solear	397	230
Sukadiri	232	84
Sukamulya	316	125
Teluknaga	517	233
Tigaraksa	706	307
Total	**13.070**	**5.807**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025



5.2. Anak Putus Sekolah dan Upaya Penanganannya

Anak putus sekolah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Ketika seorang anak berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, hal ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak tersebut, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia daerah secara keseluruhan. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan lebih rentan terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan pekerjaan berisiko, serta memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berbagai faktor turut memengaruhi terjadinya anak putus sekolah, antara lain:

- Faktor ekonomi, seperti keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah.
- Kurangnya motivasi belajar dan rendahnya dukungan lingkungan belajar.
- Pola asuh yang kurang mendukung pendidikan atau beban tanggung jawab keluarga pada anak.
- Perkawinan anak, yang menyebabkan anak perempuan paling rentan keluar dari sekolah.
- Akses pendidikan yang terbatas pada wilayah tertentu yang jauh dari sekolah atau layanan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan, DP3A, sekolah, dan pemerintah desa menjalankan berbagai langkah strategis, di antaranya:

- Program peningkatan motivasi belajar bagi anak berisiko putus sekolah melalui konseling, pendampingan, dan kegiatan pembinaan karakter.



- Program kesetaraan (Kejar Paket A/B/C) bagi anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal namun tetap membutuhkan layanan pendidikan.
- Bantuan biaya pendidikan, termasuk seragam, perlengkapan sekolah, dan subsidi lain bagi keluarga miskin.
- Program penjangkauan (reach out) untuk menemukan, mendata, dan mengembalikan anak putus sekolah ke layanan pendidikan, bekerja sama dengan pemerintah desa serta lembaga masyarakat.
- Monitoring kehadiran siswa secara berkala oleh satuan pendidikan melalui sistem administrasi sekolah dan pelaporan ke dinas terkait.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan DP3A memperkuat upaya reintegrasi anak ke sistem pendidikan formal maupun nonformal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya.

Tabel 5.2.1. Jumlah Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Tingkat Dasar	Lanjutan Tingkat Pertama
(1)	(2)	(3)
Balaraja	13	6
Cikupa	14	0
Cisauk	33	0
Cisoka	14	1
Curug	17	0
Gunung Kaler	46	2
Jambe	1	1
Jayanti	3	7
Kelapa Dua	12	0
Kemiri	1	11
Kosambi	19	0
Kresek	12	5
Kronjo	28	2
Legok	9	13
Mauk	28	2

Kecamatan	Tingkat Dasar	Lanjutan Tingkat Pertama
Mekar Baru	12	4
Pagedangan	5	0
Pakuhaji	11	1
Panongan	25	2
Pasar Kemis	8	2
Rajeg	49	2
Sepatan	17	1
Sepatan Timur	9	5
Sindang Jaya	36	0
Solear	29	2
Sukadiri	9	3
Sukamulya	7	0
Teluknaga	42	0
Tigaraksa	44	0
Total	**553**	**72**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

5.3. Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi. Kabupaten Tangerang berkomitmen mewujudkan sistem pendidikan yang ramah, setara, dan dapat diakses oleh seluruh anak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Anak berkebutuhan khusus sering menghadapi hambatan dalam mengikuti pendidikan formal, seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pendidik khusus, serta stigma dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, penerapan pendidikan inklusif menjadi langkah strategis untuk memastikan mereka dapat belajar bersama anak lain dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan potensi dirinya.



Untuk mendukung keberlanjutan pendidikan inklusif, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan dan DP3A telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di setiap kecamatan agar jangkauan layanan semakin luas.
- Penyediaan guru pendamping khusus (GPK) secara bertahap untuk mendampingi ABK selama proses pembelajaran.
- Pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam mendampingi anak disabilitas dan menerapkan metode pembelajaran diferensiasi.
- Penyediaan layanan asesmen awal, identifikasi dini, dan rujukan melalui Puskesmas, Pusat Layanan Disabilitas, dan lembaga profesional.
- Peningkatan fasilitas fisik sekolah, seperti aksesibilitas bangunan, jalur kursi roda, media pembelajaran adaptif, dan ruang layanan khusus.
- Pendampingan keluarga ABK melalui PUSPAGA, psikolog, dan konselor sekolah untuk memperkuat dukungan keluarga terhadap perkembangan anak.

Sinergi lintas sektor ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan nondiskriminatif bagi semua anak. Penerapan pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi ABK, tetapi juga menumbuhkan nilai empati, toleransi, dan keberagaman bagi seluruh peserta didik.

5.4. Pemanfaatan Waktu Luang, Kreativitas, dan Budaya

Pemanfaatan waktu luang secara positif merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Waktu luang yang dikelola dengan baik dapat memperkuat kreativitas, meningkatkan kemampuan sosial, serta mencegah anak dari



aktivitas berisiko. Kabupaten Tangerang terus mendorong berbagai bentuk kegiatan yang mampu menumbuhkan minat, bakat, serta potensi budaya dan seni pada anak.

Anak-anak di Kabupaten Tangerang memiliki akses terhadap berbagai jenis kegiatan, seperti olahraga, seni budaya, kreativitas digital, literasi, hingga kegiatan keagamaan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, DP3A, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembangkan program-program pembinaan yang ramah anak, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Penyediaan ruang kreativitas anak melalui sekolah, sanggar seni, pusat komunitas, dan fasilitas publik ramah anak.
- Pembinaan minat dan bakat di bidang seni budaya, seperti tari tradisional, musik, teater, seni rupa, dan kearifan lokal khas Tangerang.
- Program olahraga pelajar, termasuk pembinaan atlet muda melalui kompetisi seperti O2SN, FLS2N, dan kegiatan olahraga rutin di sekolah.
- Penyediaan taman bermain, ruang terbuka hijau, dan arena olahraga publik agar anak dapat beraktivitas fisik secara aman dan sehat.
- Dorongan untuk kegiatan literasi, seperti perpustakaan keliling, pojok baca ramah anak, serta lomba literasi di sekolah.
- Pemanfaatan teknologi secara positif, termasuk kelas coding dasar, pelatihan konten kreatif, dan edukasi literasi digital untuk mencegah dampak negatif internet.



Selain itu, Kabupaten Tangerang terus menguatkan peran masyarakat dan keluarga dalam mendampingi anak saat mengisi waktu luang. Kegiatan berbasis komunitas seperti Karang Taruna, PATBM, dan forum anak membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih produktif dan aman bagi anak.

Pemanfaatan waktu luang yang berorientasi positif membantu anak membangun karakter, percaya diri, serta kemampuan kolaborasi. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Tangerang dalam membentuk generasi yang kreatif, berbudaya, dan berdaya saing menuju daerah yang Semakin Gemilang dan Ramah Anak.

5.5. Anak dalam Kegiatan Budaya dan Pelestarian Tradisi

Pelestarian budaya dan tradisi lokal merupakan bagian penting dalam membentuk identitas dan karakter anak. Kabupaten Tangerang yang kaya akan budaya Betawi, Sunda, serta tradisi lokal lainnya berkomitmen melibatkan anak dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya agar nilai-nilai luhur daerah tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kegiatan budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi karakter, penguatan jati diri, serta pengembangan kreativitas anak. Melalui kegiatan seni, anak belajar mengenal sejarah daerah, nilai kebersamaan, toleransi, dan keberagaman budaya yang menjadi kekuatan masyarakat Tangerang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DP3A, serta komunitas budaya terus mendorong pelibatan anak dalam berbagai bentuk kegiatan budaya, antara lain:

- Festival dan lomba seni budaya, seperti tari tradisional, musik daerah, pencak silat, dan seni teater.



- Pendidikan budaya berbasis sekolah, melalui muatan lokal, ekstrakurikuler seni, dan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5).
- Pelibatan anak dalam Hari Jadi Kabupaten Tangerang, termasuk parade budaya, pameran batik, dan pertunjukan seni oleh pelajar.
- Program pelestarian batik khas Kabupaten Tangerang, di mana anak diperkenalkan pada motif, filosofi, dan proses pembuatan batik sebagai identitas lokal.
- Kegiatan budaya berbasis komunitas, seperti sanggar seni, kelompok kreatif remaja, hingga kegiatan keagamaan dan adat yang melibatkan anak sebagai peserta aktif.
- Peningkatan akses anak terhadap ruang pertunjukan budaya, termasuk gedung kesenian, alun-alun, dan ruang publik terbuka.

Selain itu, Kabupaten Tangerang terus memperkuat kemitraan dengan komunitas budaya, tokoh adat, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem budaya yang ramah anak. Pendekatan ini memastikan bahwa pelestarian tradisi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Pelibatan aktif anak dalam kegiatan budaya membantu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal, sekaligus memperkuat karakter dan kreativitas mereka. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan berkesinambungan dari generasi ke generasi, mendukung visi Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Berbudaya, dan Ramah Anak.

5.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

Meskipun berbagai capaian positif telah diraih dalam pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta



pelestarian budaya anak di Kabupaten Tangerang, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lintas sektor. Tantangan ini berkaitan dengan kesenjangan akses, keterbatasan fasilitas, perubahan sosial, serta dinamika teknologi yang memengaruhi pola perilaku anak.

Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi antara lain:

- Kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertentu, terutama pada anak dari keluarga miskin, anak di wilayah padat penduduk, dan anak yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan.
- Masih adanya anak putus sekolah, baik karena faktor ekonomi, sosial, perkawinan anak, maupun rendahnya motivasi belajar.
- Keterbatasan lembaga pendidikan inklusif dan tenaga pendidik khusus untuk mendukung pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- Minimnya ruang publik ramah anak di beberapa wilayah, sehingga pemanfaatan waktu luang anak belum optimal.
- Kurangnya fasilitas seni, budaya, dan kreativitas yang mudah diakses oleh anak di tingkat kecamatan/desa.
- Pengaruh negatif teknologi digital, termasuk kecanduan gawai, paparan konten tidak ramah anak, dan kurangnya literasi digital.
- Rendahnya pelibatan anak dalam kegiatan seni budaya, terutama di wilayah urban yang lebih terpapar budaya populer dan modern.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam memperkuat sistem perlindungan khusus anak. Arah kebijakan tersebut meliputi:



- Penguatan pemerataan akses pendidikan, termasuk penyediaan sarana prasarana baru, transportasi sekolah, dan beasiswa bagi keluarga rentan.
- Program percepatan penanganan anak putus sekolah, melalui penjangkauan aktif, layanan pendidikan nonformal, dan pendampingan keluarga.
- Pengembangan pendidikan inklusif, termasuk penambahan sekolah inklusi, peningkatan kapasitas guru, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi anak disabilitas.
- Peningkatan ruang publik ramah anak, taman bermain, dan fasilitas olahraga di desa/kelurahan.
- Penguatan kegiatan seni budaya anak, seperti festival budaya, sanggar seni, kompetisi kreativitas, serta muatan lokal budaya daerah.
- Mendorong literasi digital aman dan produktif, melalui edukasi, kelas teknologi, dan kolaborasi dengan sekolah serta komunitas.
- Pelibatan forum anak, sekolah, dan komunitas lokal dalam kegiatan pelestarian budaya dan pembinaan karakter berbasis tradisi daerah.

Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan, kreativitas, dan budaya anak secara menyeluruh, sehingga generasi masa depan dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berbudaya menuju Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



BAB VI
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

6.1. Anak Korban Kekerasan
6.2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
6.3. Anak Korban Eksploitasi
6.4. Anak Korban Perdagangan Orang (TPPO)
6.5. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Lainnya
6.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

STOP!
KEKERASAN
PADA PEREMPUAN & ANAK!

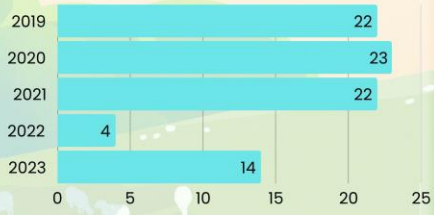


Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*



Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2019-2023





BAB VI
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

6.1. Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun kekerasan berbasis daring. Kasus-kasus tersebut sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yaitu keluarga, sekolah, serta komunitas di sekitar tempat tinggal.

Sebagai wujud komitmen dalam penanganan kasus kekerasan, Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyediakan layanan terpadu melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta sistem pelaporan nasional SIMFONI PPA. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kejadian kekerasan, sementara anak korban dapat memperoleh pendampingan psikologis, pelayanan konseling, dukungan hukum, rujukan medis, hingga rehabilitasi sosial.

Selain penanganan kasus, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya preventif melalui sosialisasi anti-kekerasan, pendidikan pengasuhan positif, pembinaan sekolah dan satuan pendidikan ramah anak, serta penguatan kapasitas aparatur kecamatan/kelurahan dalam mengenali dan merespons kasus kekerasan.



Untuk memberikan gambaran kondisi terkini, data mengenai anak korban kekerasan di Kabupaten Tangerang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1.1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balaraja	2	5	3	3	0
Cikupa	8	20	11	8	2
Cisauk	1	1	1	0	4
Cisoka	5	5	1	2	0
Curug	1	4	7	5	1
Gunung Kaler	2	1	0	1	2
Jambe	4	6	10	1	0
Jayanti	1	7	7	1	0
Kelapa Dua	6	4	3	3	2
Kemiri	16	1	3	1	1
Kosambi	0	0	2	4	3
Kresek	2	2	4	2	3
Kronjo	0	0	1	0	3
Legok	19	0	3	2	7
Mauk	0	3	1	4	0
Mekar Baru	1	0	1	1	2
Pagedangan	5	4	2	0	3
Pakuhaji	1	1	5	1	1
Panongan	15	0	2	3	1
Pasar Kemis	4	15	9	4	2
Rajeg	32	12	4	1	0
Sepatan	16	12	8	1	0
Sepatan Timur	2	5	5	0	3
Sindang Jaya	1	0	6	2	2
Solear	4	3	5	0	1
Sukadiri	0	0	2	0	2
Sukamulya	14	3	4	1	2
Teluknaga	87	1	4	1	3
Tigaraksa	1	5	9	4	0
Total	250	120	123	56	50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



6.2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Penanganan ABH harus dilakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Di Kabupaten Tangerang, penanganan ABH dilakukan dengan pendekatan restorative justice dan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan untuk mencegah anak mengalami dampak negatif dari proses hukum formal. Model ini mengedepankan dialog, pemulihan hubungan, serta tanggung jawab yang proporsional bagi anak.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui DP3A bekerja sama dengan Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta lembaga bantuan hukum untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan sejak tahap awal, termasuk:

- Pendampingan hukum dan psikologis.
- Asesmen kondisi sosial dan keluarga.
- Konseling serta dukungan pemulihan.
- Fasilitasi diversi sesuai ketentuan UU SPPA.
- Rujukan ke layanan rehabilitasi jika diperlukan.

Pendekatan ini penting agar anak tidak mengalami stigma, diskriminasi, atau trauma yang dapat menghambat masa depannya. Untuk memberikan gambaran kondisi, ringkasan data ABH Kabupaten Tangerang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.2.1. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balaraja	0	0	0	0	1
Cikupa	0	0	0	0	3
Cisauk	0	0	0	0	0
Cisoka	0	0	0	0	0
Curug	0	0	0	0	1
Gunung Kaler	0	0	0	0	0
Jambe	0	0	1	0	0
Jayanti	0	1	7	0	0
Kelapa Dua	0	0	0	0	0
Kemiri	0	0	0	0	0
Kosambi	0	0	0	2	4
Kresek	0	3	0	0	1
Kronjo	0	0	0	0	0
Legok	0	0	0	0	0
Mauk	0	0	0	0	0
Mekar Baru	0	0	0	0	0
Pagedangan	0	0	0	0	0
Pakuhaji	0	0	0	0	0
Panongan	0	0	0	0	0
Pasar Kemis	0	7	0	0	0
Rajeg	22	2	3	0	0
Sepatan	0	10	5	0	0
Sepatan Timur	0	3	2	0	0
Sindang Jaya	0	0	0	0	1
Solear	0	0	0	0	0
Sukadiri	0	0	1	00	0
Sukamulya	0	0	0	0	1
Teluknaga	0	0	0	2	1
Tigaraksa	0	0	0	0	1
Total	**22**	**23**	**22**	**4**	**14**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

6.3. Anak Korban Eksploitasi

Anak korban eksploitasi adalah anak yang mengalami pemanfaatan secara tidak manusiawi oleh individu atau pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi, seksual, ataupun kegiatan lain yang merugikan dirinya. Eksploitasi terhadap anak dapat berupa



eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, pekerja anak, pemaksaan bekerja, maupun bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya yang membahayakan tumbuh kembang anak.

Di Kabupaten Tangerang, risiko eksploitasi anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, pengawasan lingkungan yang lemah, serta tingginya mobilitas penduduk di wilayah industri dan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang merespons persoalan ini melalui upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban.

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

- Sosialisasi mengenai bahaya eksploitasi dan pekerja anak kepada masyarakat.
- Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk memantau sektor-sektor kerja berisiko.
- Pembinaan keluarga rentan melalui PUSPAGA dan UPTD PPA.
- Patroli sosial dan pemantauan lapangan oleh Dinas Sosial dan aparat wilayah.
- Edukasi di sekolah terkait perlindungan anak dan hak-hak anak.

Sementara itu, untuk penanganan kasus, DP3A, Disnaker, Dinsos, kepolisian, dan lembaga layanan lainnya bekerja sama dalam proses pelaporan, penyelamatan korban, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial. Pendekatan lintas sektor ini penting untuk memutus rantai eksploitasi dan memastikan anak mendapatkan perlindungan yang layak.

Untuk memberikan gambaran kondisi, ringkasan data anak korban eksploitasi di Kabupaten Tangerang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.3.1. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2019	14
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

6.4. Anak Korban Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama ketika korbannya adalah anak. Anak korban perdagangan orang (TPPO) umumnya mengalami eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, kerja paksa, atau pengiriman ilegal lintas wilayah tanpa perlindungan yang layak. Kasus TPPO dapat terjadi akibat tingginya mobilitas penduduk, kurangnya pengawasan, kemiskinan, serta tawaran pekerjaan yang menyesatkan.

Di Kabupaten Tangerang, upaya pencegahan TPPO dilakukan secara intensif melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat, terutama keluarga rentan dan calon pekerja migran. Pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, terminal, pusat keramaian, serta titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi perekrutan ilegal.

Penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu antara DP3A, Polres, BP2MI, Dinas Sosial, dan lembaga layanan terkait lainnya. Langkah-langkah penanganan termasuk:

- Identifikasi dini dan penyelamatan *(rescue)* korban.
- Pendampingan psikologis dan layanan konseling.
- Pendampingan hukum selama proses penyidikan dan peradilan.



- Rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- Koordinasi lintas daerah atau lintas negara jika diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menguatkan peran masyarakat dalam deteksi dini TPPO melalui forum-forum perlindungan anak, tokoh masyarakat, relawan, dan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

Untuk memberikan gambaran kondisi terkait kasus TPPO, disajikan tabel berikut:

Tabel 6.4.1. Jumlah Anak Korban Perdagangan Orang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2019	3
2020	1
2021	0
2022	0
2023	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

6.5. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Lainnya

Selain anak korban kekerasan, ABH, eksploitasi, dan TPPO, terdapat sejumlah kelompok anak yang secara hukum dikategorikan sebagai Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak dalam kategori ini membutuhkan perlindungan tambahan karena kondisi tertentu yang meningkatkan kerentanan mereka secara fisik, sosial, maupun psikologis.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui DP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan berbagai mitra layanan terus memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka ditangani melalui pendekatan

multidisiplin, yang mencakup pendampingan, pemulihan, edukasi, serta layanan rujukan intensif.

Adapun kelompok AMPK yang menjadi perhatian di Kabupaten Tangerang meliputi:

a. Anak Korban Bencana

Anak yang terdampak bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, dan kebakaran permukiman sering kali mengalami gangguan psikologis, kehilangan tempat tinggal, maupun kekurangan kebutuhan dasar. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan layanan dukungan psikososial, pos perlindungan anak, penyediaan kebutuhan dasar (makanan, pakaian, layanan kesehatan), serta pendampingan pemulihan pasca-bencana.

b. Anak Korban Penelantaran

Anak korban penelantaran adalah anak yang kebutuhan dasar fisik, emosional, atau pendidikannya tidak terpenuhi oleh orang tua atau wali. Kasus ini biasanya ditangani oleh Dinas Sosial melalui panti sosial, layanan asesmen, serta penempatan sementara jika diperlukan. DP3A memberikan pendampingan psikologis dan memastikan anak memperoleh perlindungan sesuai kepentingannya.

c. Anak dengan HIV/AIDS

Anak dengan HIV/AIDS membutuhkan layanan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk akses obat Antiretroviral (ARV), pemeriksaan rutin, serta pemantauan kondisi imunologis. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat medis, tetapi juga terkait dengan stigma sosial. Oleh karena itu, edukasi

masyarakat dan pendampingan keluarga menjadi bagian penting dari strategi perlindungan anak ODHA.

d. Anak dalam Situasi Darurat Lainnya

Kategori ini mencakup anak yang terdampak konflik keluarga, migrasi, kehilangan pengasuhan, atau situasi sosial tertentu yang membuat mereka berada dalam kondisi rawan. Pemerintah daerah melalui DP3A, Dinsos, dan pemerintah kecamatan/desa melakukan identifikasi dini dan memastikan intervensi tepat sasaran.

Tabel 6.5.1. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balaraja	10	3	13
Cikupa	30	22	52
Cisauk	10	6	16
Cisoka	1	0	1
Curug	24	21	45
Gunung Kaler	17	18	35
Jambe	2	0	2
Jayanti	6	1	7
Kelapa Dua	2	1	3
Kemiri	3	0	3
Kosambi	30	14	44
Kresek	7	2	9
Kronjo	19	7	26
Legok	17	23	40
Mauk	19	15	34
Mekar Baru	59	39	98
Pagedangan	18	6	24
Pakuhaji	38	24	62
Panongan	0	0	0
Pasar Kemis	13	15	28
Rajeg	24	9	33
Sepatan	8	4	12
Sepatan Timur	9	2	11
Sindang Jaya	10	11	21
Solear	0	0	0

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sukadiri	2	0	2
Sukamulya	1	2	3
Teluknaga	41	26	67
Tigaraksa	0	0	0
Total	**420**	**271**	**691**

Sumber: Dinas Sosial, 2025

6.6. Tantangan dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan perlindungan khusus bagi seluruh anak di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Tantangan tersebut tidak hanya terkait penanganan kasus, tetapi juga aspek pencegahan, kapasitas layanan, hingga sosial budaya masyarakat.

Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi antara lain:

- Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan, terutama kasus dalam lingkungan keluarga yang dianggap aib atau sengaja ditutupi.
- Tingginya kompleksitas kasus, seperti kekerasan seksual, eksploitasi, dan TPPO yang membutuhkan penanganan intensif serta koordinasi banyak pihak.
- Keterbatasan sumber daya manusia pendamping profesional, seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial daerah.
- Belum meratanya layanan perlindungan anak hingga ke tingkat desa/kelurahan, terutama wilayah perdesaan dan kawasan padat penduduk.
- Stigma dan norma sosial yang masih menghambat anak korban untuk melapor dan mengakses layanan pemulihan.



- Keterbatasan fasilitas layanan rehabilitasi jangka panjang, terutama bagi korban kekerasan seksual dan anak dengan kebutuhan perlindungan khusus lainnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam memperkuat sistem perlindungan khusus anak. Arah kebijakan tersebut meliputi:

- Penguatan layanan UPTD PPA dan PUSPAGA, termasuk penambahan tenaga pendamping, psikolog, dan perluasan akses layanan hingga ke tingkat kecamatan.
- Optimalisasi mekanisme penanganan kasus berbasis manajemen kasus (case management) yang melibatkan dinas terkait, pihak kepolisian, lembaga hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
- Peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi perlindungan anak berbasis sekolah, keluarga, dan komunitas.
- Pengembangan sistem pelaporan dan rujukan melalui SIMFONI PPA dan kanal layanan cepat tanggap berbasis digital.
- Penguatan peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap desa/kelurahan untuk melakukan deteksi dini dan respon cepat terhadap kasus.
- Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, guna mengurangi risiko eksploitasi dan kekerasan berbasis ekonomi.
- Perluasan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban TPPO, kekerasan seksual, dan kategori AMPK lainnya.

Melalui arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan bebas kekerasan bagi seluruh anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi yang terlindungi,



berdaya, dan siap menyongsong masa depan Kabupaten Tangerang yang Semakin Gemilang, Setara, dan Ramah Anak.



BAB VII
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan gambaran komprehensif mengenai kondisi, capaian, serta tantangan pembangunan yang berperspektif gender dan ramah anak di wilayah Kabupaten Tangerang. Melalui data terpilah serta analisis lintas sektor, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Upaya pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender tidak dapat berjalan secara parsial. Diperlukan kerja sama dan komitmen bersama dari seluruh pihak mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga layanan, hingga pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anak-anak Kabupaten Tangerang tumbuh dan berkembang secara optimal, aman, sehat, kreatif, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan memastikan ketersediaan data terpilah, penyusunan kebijakan yang inklusif, serta peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan budaya.

Masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan akses layanan dasar, kasus kekerasan terhadap anak, anak



putus sekolah, serta keterbatasan ruang publik ramah anak. Namun dengan arah kebijakan yang tepat, inovasi program, dan sinergi multipihak, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi data, tetapi juga menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah yang semakin responsif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mewujudkan daerah yang Semakin Gemilang, Setara, Inklusif, dan Ramah Anak, demi terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di masa depan.